



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan). Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi atas indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*Performance Gap*) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan Strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*Performance Improvement*).

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (lampiran Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{target pencapaian (realisasi)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja pada pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan kedua rumus diatas dikarenakan ada beberapa target yang pada kenyataannya lebih sedikit dari realisasi sehingga memunculkan capaian kinerja yang positif dan yang negatif.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe berikut sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja utama ditetapkanlah kategori pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut:

Tabel 3.1

Kategori Pencapaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
I	> 85%	Sangat Baik
II	70% - 85%	Baik
III	55% - 69%	Cukup
IV	< 55%	Kurang

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2012 – 2017. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang sudah diubah mengikuti perubahan Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2017. Uraian target dan realisasi dari indikator kinerja setiap sasaran dapat dilihat secara rinci pada tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2017 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN HASIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;	1.1 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	media	4	4	100%
		1.2 Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah	kasus	200	197	99%

2	Mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja;	2.1	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	100%	23%	23%
		2.2	Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian	%	0.83%	1.07%	70%
		2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WDP	75%
		2.4	Kepemilikan KTP	%	100%	80%	80%
		2.5	Lamanya proses perijinan	hari	1 s/d 7 hari	1 s/d 7 hari	100%
		2.6	Evaluasi penyelenggaraan SAKIP SKPD	%	100%	79%	79%
		2.7	Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota				
			- LPPD	angka absolut	Sangat Tinggi (3)	Tinggi (2,7)	90%
			- LKjIP	kategori	B (60)	CC (51,72)	80%
		2.8	Keterbukaan informasi publik melalui website	ada/tidak ada	ada	ada	100%
3	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;	2.9	Tingkat keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD	%	100%	87%	87%
		2.10	Persentase penanganan bencana	%	100%	100%	100%
		3.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	1	1	100%
3		3.2	Pelestarian karya seni dan budaya warisan sebagai nilai sejarah	jenis	1	1	100%
		3.3	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	klp	1	1	100%
4	Mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami;	4.1	Rasio ketersediaan Dayah dan Santri	%	0.007	0.006	87%
		4.2	Rasio ketersediaan Tengku/Guru dan Santri	%	0.07	0.059	89%

		4.3	Rasio ketersediaan balai pengajian di gampong	%	0.025	0.019	78%
		4.4	Pembinaan Hafidz&Hafidzah Kota Lhokseumawe	org	56	49	88%
		4.5	Peningkatan penerimaan zakat	%	100%	87%	87%
5	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat;	5.1	Pertumbuhan PDRB				
			Migas	%	2.46	0.1	4%
			Non Migas	%	7.12	0.2	3%
		5.2	Persentase koperasi aktif	%	88%	32%	37%
		5.3	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	1895	2840	150%
		5.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	14.71	11.76	80%
6	Menurunnya angka kemiskinan;	6.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe	angka absolut	78	75.78	97%
		6.2	Kelancaran Penyaluran Raskin	RTS	7200	7164	100%
		6.3	Tingkat pengangguran terbuka	%	6.55	7.36	88%
		6.4	Rasio penduduk yang bekerja (persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan)	%	92.06	61.78	67%
		6.5	Angka partisipasi angkatan kerja	%	89.81	73.34	82%
		6.6	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani	%	100%	95%	95%
7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang berbasis komoditi unggulan;	7.1	Persentase penanggulangan penyakit ternak	%	100	90	90%
		7.2	Pengembangan budidaya perikanan	terlaksana	terlaksana	terlaksana	100%

		7.3	Cakupan binaan Kelompok Nelayan	klp	5	4	80%
8	Meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata;	8.1	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2017	rupiah	32,875,450,951	31,890,248,006	97%
		8.2	Kunjungan wisata	jiwa	229.095	229.095	100%
9	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas;	9.1	Persentase Penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf	%	98%	94%	96%
		9.2	Angka parsitipasi murni				
			SD/MI/Paket A	%	93.99	81.81	87%
			SMP/MTS/Paket B	%	80.11	81.24	101%
			SM/MA/Paket C	%	77.55	73.34	95%
		9.3	Angka Kelulusan				
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.87	99.89	100%
10	Menciptakan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga;		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.13	99.98	101%
			Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.25	99.91	101%
		9.4	Persentase guru berpendidikan S1/D4	%	93.46	87.87	94%
		10.1	Pembinaan terhadap organisasi pemuda	klp	68	68	100%
		10.2	Pembinaan terhadap organisasi olahraga	klp	159	159	100%
11	Mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal;	11.1	Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 pddk	0.04	0.03	75%
		11.2	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	87.92	88%
		11.3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100%
		11.4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru	%	100	100	100%
		11.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100%

		11.6	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000	1000	996.07	100%
		11.7	Angka usia harapan hidup	tahun	73.57	71.05	97%
		11.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	%	97.09	92.02	95%
12	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	12.1	Cakupan peserta KB aktif	%	91.67	82.91	90%
		12.2	Rasio KDRT	%	0.019	0.015	80%
		12.3	Pembinaan forum komunikasi anak	org	581	581	100%
		12.4	Indeks Pembangunan Gender	%	98	94.62	97%
13	Meningkatkan kualitas infrastruktur Kota	13.1	Penurunan persentase kawasan pemukiman kumuh	%	92.12	25.38	28%
		13.2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	78.8	35.80	45%
		13.3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih	%	89.49	60.54	68%
		13.4	Persentase penanganan sampah	%	96.54	82.61	86%
		13.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	1.36	0.69	51%
		13.6	Peningkatan jumlah Bangunan yang ber-IMB	unit	100	125	125%

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja tersebut maka diperoleh nilai **rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama** Tahun 2017 yaitu sebesar **86%** sedangkan **rata-rata tingkat capaian sasaran strategis** pada Tahun 2017 yaitu sebesar **88%**.

3.1.1 ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai 13 (tiga belas) sasaran yang merupakan hasil penggabungan beberapa sasaran yang mempunyai kesamaan dan saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017. Sehingga sasaran dalam RPJMD yang awalnya berjumlah 25 (dua puluh lima) setelah digabungkan menyusut menjadi 13 (tiga belas) sasaran dan juga mengalami perubahan terhadap penetapan indikator kinerja dari tiap sasaran tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya tolak ukur yang memenuhi unsur spesifik, terukur, tercapai, relevan dan tepat waktu sehingga kriteria SMART dapat terlihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lhokseumawe Tahun 2016 ini. Selain itu, perubahan indikator kinerja dilakukan sebagai upaya peningkatan capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih berorientasi hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun analisis pencapaian sasaran dan indikatornya akan dijabarkan per jumlah sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;

Untuk mewujudkan implementasi UUPA secara cepat dan akurat, Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap tahunnya selalu berusaha mengimplementasikan berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada Tahun ini capaian kinerja untuk sasaran ini adalah sebesar **99 %** dengan 2 (dua) indikator pendukung yaitu Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan dan penertiban pelanggaran peraturan daerah. Perwujudan sasaran ini dilaksanakan melalui penetapan indikator utama yang mendukung serta program dan kegiatan yang terdapat didalamnya. Berikut kami sajikan tabel 3.3 hasil capaian sasaran 1 beserta evaluasinya.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran 1
“meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.1	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	media	4	4	100%	4	4	100%
1.2	Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah	kasus	250	298	81%	200	197	99%
Rata-rata Capaian					94%			99 %
Kategori Capaian.....					BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran 1

1.1 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;

Program pendukung : Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan pendukung : Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Anggaran : Rp. 188.000.000,-

Realisasi : Rp. 187.845.000,-

Persentase : 99.92%

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting dalam proses legislasi setelah pengundangan. Penyebarluasan merupakan proses aktif pemerintah agar suatu perundang-undangan diketahui oleh masyarakat. Publikasi Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui 4 media yaitu dengan mencetak Spanduk, membuat baliho, Billboard dan umbul-umbul. Capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

1.2 Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah;

- Program pendukung* : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- *Kegiatan pendukung* : Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Jumlah Anggaran* : Rp. 324.414.350,-
- Realisasi* : Rp. 324.414.350,-
- Persentase* : 100%
-
- *Kegiatan pendukung* : Peningkatan Penertiban Syariat Islam di Kota Lhokseumawe
- Jumlah Anggaran* : Rp. 446.128.000,-
- Realisasi* : Rp. 418.338.000,-
- Persentase* : 93.77%
-
- *Kegiatan pendukung* : Pelaksanaan Hukuman Pelanggar Syariat Islam
- Jumlah Anggaran* : Rp. 139.763.000,-
- Realisasi* : Rp. 99.100.000,-
- Persentase* : 70.91%

Pemerintah Kota Lhokseumawe berusaha meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta turunannya. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan yaitu penegakan syariat islam di wilayahnya.



Gambar: *Eksekusi hukuman cambuk di Kota Lhokseumawe. (08 September 2017)*

Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat serius dalam menegakkan syariat islam yaitu melalui penegakan Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Pada Tahun 2017, jumlah pelanggaran Qanun (Peraturan Daerah) yang berhasil ditangani dan ditertibkan sebanyak 197 kasus. Dari target yang ditetapkan adalah 200 kasus maka capaian indikator kinerjanya adalah 99%.

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 tentang Maisir : 8 kasus
2. Pasal 23 tentang Khalwat : 104 kasus
3. Pasal 25 tentang Ikhtilath : 24 kasus
4. Pasal 27 tentang Ikhtilath : 46 kasus
5. Pasal 33 tentang zina : 10 kasus

Sasaran 2 : Mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja;

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berupaya untuk mewujudkan pemerintah yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah Kota Lhokseumawe.

Hal tersebut dilakukan guna terciptanya tata kelola pemerintahan Kota Lhokseumawe yang tertib sesuai dengan amanah dalam peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja untuk sasaran kedua ini adalah sebesar 80% dan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

“mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2.1	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	100	29.45	29%	100	23	23%
2.2	Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian	%	0.14%	0.25%	83%	0.83	1.07	70%
2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini	WTP	WTP	100%	WTP	WDP	75%
2.4	Kepemilikan KTP	%	90.81	82.06	90.37%	100	80	80%
2.5	Lamanya proses perijinan	hari	1 s/d 7	1 s/d 7	100%	1 s/d 7	1 s/d 7	100%
2.6	Evaluasi penyelenggaraan SAKIP SKPD	%	0	0	0	100	79	79%
2.7	Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota - LPPD	angka absolut	Sangat Tinggi (3)	Sangat Tinggi (3)	100%	Sangat Tinggi (3)	Sangat Tinggi (2.7)	90%
	- LKjIP		CC (65)	CC (50,48)	78%	CC (65)	CC (51,72)	80%
2.8	Keterbukaan informasi public melalui website	Ada/tidak ada	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100%
2.9	Tingkat keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD	%	0	0	0	100	87	87%
2.10	Persentase penanganan bencana	%	0	0	0	100	100	100%

Rata-rata Capaian	77%		80%
Kategori Capaian.....	BAIK		BAIK

Analisis pencapaian indikator kinerja untuk sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1. Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan;

Program pendukung : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan pendukung : Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

Jumlah Anggaran : Rp. 34.358.350,-

Realisasi : Rp. 21.641.150,-

Persentase : 62.99%

Penyelenggaraan Pemerintahan tentunya tidak lepas dari sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah itu sendiri. Birokrasi yang kuat tercipta bila setiap Sumber Daya Aparaturnya mempunyai kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas dalam suatu jabatan struktural.

Untuk menciptakan sumber daya yang profesional salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk PNS yang mempunyai jabatan struktural. Tujuan dari keikutsertaan diklat kepemimpinan tersebut adalah untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural (eselonering) yang akan berperan dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.

Adapun Jumlah PNS dengan jabatan struktural yang mendukung birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe per Desember Tahun 2017 sebanyak 455 orang. Berdasarkan data yang telah direkapitulasi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe bahwa jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan baik dari Diklat Pim IV, Diklat Pim III dan Diklat Pim II adalah sebanyak 104 orang. Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini adalah 25%, dengan target 100%, sehingga yang capaian kinerja untuk indikator ini hanya sebesar 23%.

2. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian;

Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe per Desember 2017 adalah sebesar 3.632 orang yang tersebar pada 33 (tiga puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah. Pada Tahun 2017 terindikasi sebanyak 39 orang PNS yang mendapatkan hukuman/tindak disiplin sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran kode etik PNS.

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 70% dengan menggunakan penghitungan rumus kedua. Penghitungan tersebut digunakan dimana target yang ditetapkan lebih kecil dibanding realisasi yang diharapkan. Indikator ini merupakan pencapaian negatif dimana realisasi diharapkan lebih kecil daripada target karena indikator ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin, ternyata kenyataannya melebihi dari target yang ada.

Dari 30 orang PNS yang ditargetkan ternyata pada realisasi terdapat 39 orang PNS yang mendapatkan hukuman disiplin yang dirincikan sebagai berikut:

1. 4 (empat) orang dengan teguran lisan;
2. 31 (tiga puluh satu) orang teguran tertulis;
3. 4 (empat) orang dalam proses usul pemberhentian.

3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah;

Program pendukung : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pendukung : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Jumlah Anggaran : Rp. 78.842.000,-

Realisasi : Rp. 77.883.914,-

Persentase : 98.78%

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe yang diberikan oleh BPK Tahun Anggaran 2016

berbeda dari tahun sebelumnya. Pada LKPD Tahun Anggaran 2015 Pemko Lhokseumawe mendapatkan opini WTP. Penurunan opini terjadi karena terdapat permasalahan pada tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja di mana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara neraca *unaudited* dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil *reviu* Inspektorat.

Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka BPK memberikan opini atas LKPD Kota Lhokseumawe untuk TA 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai dengan laporan BPK No. 24.A/LHP/XVIII.BAC/09/2017 tanggal 29 September 2017.

Penurunan opini ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, dan diperlukan komitmen serta kesungguhan pemda untuk menjalankan tata kelola keuangan yang baik, sehingga tahun depan akan kembali mendapat opini WTP.

4. Kepemilikan KTP;

<i>Program pendukung</i>	: Penataan Administrasi Kependudukan
<i>Kegiatan pendukung</i>	: Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
<i>Jumlah Anggaran</i>	: Rp. 69.800.00,-
<i>Realisasi</i>	: Rp. 68.824.000,-
<i>Persentase</i>	: 98.60%

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe per Desember 2017 sebanyak 198.088 jiwa. Dari aplikasi SIAK yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe diketahui bahwa penduduk yang



wajib memiliki KTP pada Tahun 2017 adalah sebanyak 136.193 jiwa. Berdasarkan data tersebut pula diketahui bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP Tahun 2017 hanyalah sebesar 108.735 jiwa. Sehingga persentase kepemilikan KTP di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sebesar 80 % dimana realisasi yang dicapai adalah 80% dari target 100%.

5. Lamanya proses perijinan;

<i>Program pendukung</i>	: Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<i>Jumlah Anggaran</i>	: Rp. 537.059.000,-
<i>Realisasi</i>	: Rp. 214.557.500,-
<i>Persentase</i>	: 40%

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.

Pelayanan perizinan terpadu Kota Lhokseumawe diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. Jumlah pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP dan Naker Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan dari 9 (sembilan) jenis menjadi 12 (dua belas) jenis di Tahun 2017. Dapaun jenis pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:



1. Izin Gangguan (HO)
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
6. Surat Izin Usaha Kesehatan (IUKES)
7. Izin Usaha Pariwisata
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Tanda Daftar Industri (TDI), IUI & IPU
10. Tanda Daftar Gudang (TDG)
11. Izin Usaha Perikanan
12. Izin Penanaman Modal

Gambar: *Banner jenis pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & Naker) Kota Lhokseumawe.*

Masing-masing dari 12 (dua belas) perizinan ini dilakukan sesuai prosedur SOP dan berdasarkan maklumat perjanjian yang sudah disepakati dilaksanakan tepat waktu dan prosesnya umumnya berlangsung 1 sampai dengan 7 hari. Capaian kinerja indikator ini adalah 100 % dari target yang ditetapkan 1 s/d 7 hari.

6. Evaluasi penyelenggaraan SAKIP SKPD

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari adanya Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disampaikan kepada Walikota Lhokseumawe tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe terhadap 33 (tiga puluh tiga) OPD di lingkungan Pemerintah

Kota Lhokseumawe, sebanyak 26 OPD telah menyampaikan laporan dengan baik dan cukup memuaskan namun masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan agar laporan kinerja tersebut semakin baik dan berkualitas. Capaian kinerja indikator ini adalah 79%.

7. Nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota (LPPD dan LKjIP);

Program pendukung : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pendukung : Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Jumlah Anggaran : Rp. 47.250.000,-

Realisasi : Rp. 46.720.653,-

Persentase : 98.88%

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan pemerintahan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemerintah Daerah bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemda.

LPPD disampaikan tepat waktu pada tanggal 31 Maret 2017 ke Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi, pada tahun ini LPPD Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan peringkat dan status kinerjanya yaitu menjadi peringkat ke 16 (enam belas) dengan skor 2,7639 atau dengan kategori prestasi “tinggi”. Capaian Kinerja indikator ini adalah 90%

Program pendukung : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pendukung : Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Anggaran : Rp. 66.980.000,-

Realisasi : Rp. 65.631.001,-

Persentase : 95.63%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2016 dikirim dan disampaikan langsung Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga Kementerian Dalam Negeri Tepat waktu, yaitu tanggal 30 Maret 2017. Hal tersebut sesuai dengan aturan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah paling lambat pada akhir bulan Maret. Hasil evaluasi yang diperoleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah dengan predikat/kategori "CC" dengan nilai 51,72 dan mengalami peningkatan sedikit dari segi nilai namun belum merubah predikat yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Capaian kinerja indikator ini adalah 80%.

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	30	19.87	17.69
b.	Pengukuran Kinerja	25	9.45	12.55
c.	Pelaporan Kinerja	15	8.52	8.06
d.	Evaluasi Internal	10	5.96	4.66
e.	Capaian Kinerja	20	6.68	8.77
Nilai Hasil Evaluasi		100	50.48	51.72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC

Gambar: Hasil Evaluasi LAKIP dari Kementerian Pan dan RB Tahun 2017

8. **Keterbukaan informasi publik melalui website;**

Program pendukung : Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

Kegiatan pendukung : Pengelolaan Data dan Informasi Publik

Jumlah Anggaran : Rp. 177.700.000,-

Realisasi : Rp. 174.159.300,-

Persentase : 97.52%

Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu dilakukan secara akurat, cepat dan proposional karena hal tersebut merupakan jembatan penghubung Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau publik.

Selain melalui media massa, Pemerintah Kota Lhokseumawe memanfaatkan website kota Lhokseumawe untuk penyebaran informasi penyelenggaraan ke pemerintahannya. Informasi tersebut dapat diakses di alamat www.lhokseumawekota.go.id

Dengan adanya website resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menunjukkan adanya keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Website tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode Kepala Daerah terpilih dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah 100%.

9. Tingkat Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD;

Program pendukung : Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pendukung : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah Anggaran : Rp. 72.037.650,-

Realisasi : Rp. 72.036.800,-

Persentase : 100%

Kegiatan pendukung : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Jumlah Anggaran : Rp. 60.717.650,-

Realisasi : Rp. 59.477.050,-

Persentase : 98%

Keselarasan antara dokumen perencanaan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perwujudan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe, untuk Tahun 2017 telah ditetapkan sebanyak 175 program dalam dokumen RKPD yang selaras dengan dokumen RPJMD.

Keselarasan yang dimaksud yaitu program yang terdapat dalam dokumen RKPD merupakan cerminan dari RPJMD dan tidak ditemukan adanya program yang melebihi ataupun program yang tidak terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017.

Capaian kinerja indikator ini adalah 87% dimana target yang ditetapkan sebanyak 202 program terakomodir sebanyak 175 program di Tahun 2017.

10. Persentase penanganan bencana.

Program pendukung : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

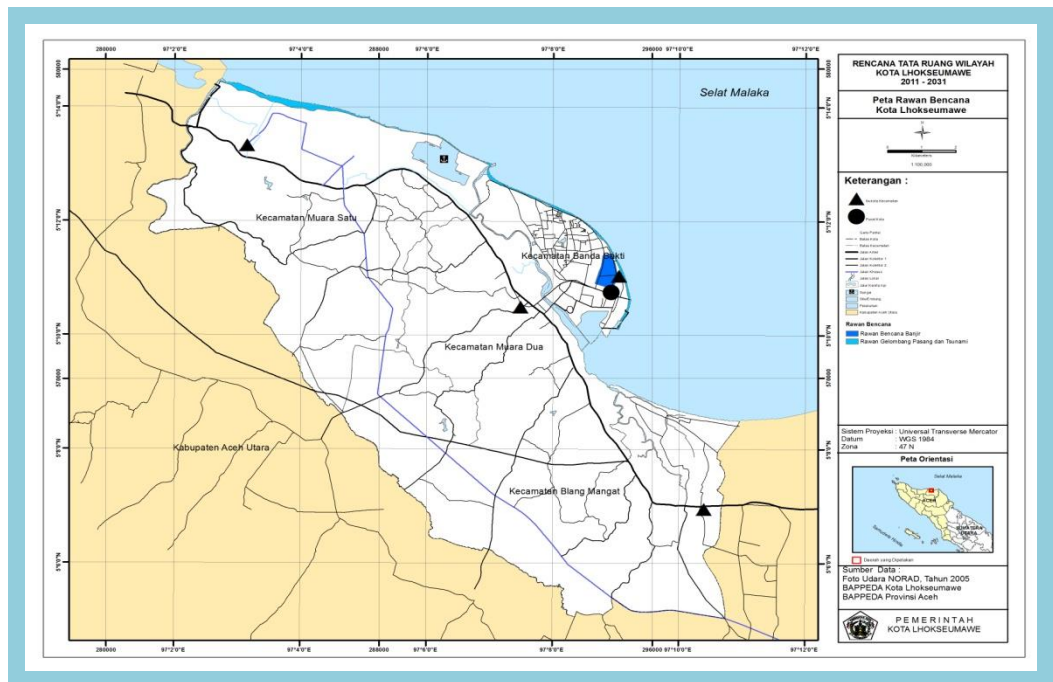
Kegiatan pendukung : Pengiriman dan Pendistribusian Logistik Penanggulangan Bencana

Jumlah Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Realisasi : Rp. 27.000.000,-

Persentase : 90%

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bukan hanya menangani saat bencana, tetapi juga sebelum dan setelah terjadi bencana. Keberadaan BPBD untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana, misalnya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bencana, menyosialisasikan berbagai hal terkait bencana, melakukan pelatihan-pelatihan atau gladi bencana.



Gambar : Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe

Pada Tahun 2017, tercatat sebanyak 17 laporan kebencanaan yang berhasil ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe. Capaian kinerja indikator ini adalah 100% dimana target yang ditetapkan 17 laporan dan berhasil ditangani sebanyak 17 laporan pula.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;

Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk tetap melestarikan sejarah dan budaya melalui peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat Kota Lhokseumawe terhadap nilai budaya dalam tatanan kehidupan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menghargai sejarah yang telah menjadikan Kota Lhokseumawe mengalami perkembangan dan kemajuan dari masa ke masa.

Pada Tahun 2017 sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) indikator dengan capaian kinerja sebesar 99% atau kategori capaian **sangat baik**. Capaian kinerja

sasaran ini mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun lalu dan pencapaian indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran 3
“Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
3.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	5	5	100%	1	1	100%
3.2	Pelestarian karya seni dan budaya warisan sebagai nilai sejarah	jenis	0	0	0%	1	1	100%
3.3	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	klp	1	1	100%	1	1	100%
Rata-rata Capaian					73%			100 %
Kategori Capaian.....					BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian indikator kinerja untuk sasaran 3 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya;

Program pendukung : Pembangunan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan pendukung : Dewan Kesenian Aceh
Jumlah Anggaran : Rp. 112.600.000,-
Realisasi : Rp. 106.587.000,-
Persentase : 94.67%

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kesenian tradisional yang menarik dan populer. Salah satunya adalah kesenian perkusi tradisional aceh atau yang dikenal dengan nama rapa'i.

Festival Rapa'I Uroeh bertujuan untuk menumbuhkan minat generasi muda dalam melestarikan seni tradisi Aceh dan sudah dilakukan secara turun-

menurun oleh generasi sebelumnya. Festival ini diharapkan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe guna membangkitkan seni tradisi yang sudah ditetapkan sebagai ikon seni budaya Kota Lhokseumawe bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kaum muda pada khususnya.



Gambar : *Festival Rapa'i Uroeh Tahun 2017 sekaligus Launching Icon seni Budaya Kota Lhokseumawe*

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dewan Kesenian Aceh mengadakan festival Rapa'i Uroeh se-Kota Lhokseumawe. Rapa'i berfungsi sebagai pengatur tempo dan ritme dalam sebuah pertunjukan. Rapa'i yang merupakan kesenian warisan *indatu* (nenek moyang) harus terus dijaga dan dilestarikan, sehingga tidak hilang ditelan zaman. Melalui kesenian daerah yang terus dijaga dan berkembang diharapkan dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional untuk berkunjung.

Capaian kinerja indikator ini adalah 100% dimana target yang ditetapkan adalah 1 kali penyelenggaraan festival dan terealisasi sebanyak 1 kali kegiatan festival.

2. Pelestarian karya seni dan budaya warisan sebagai nilai sejarah;

Program pendukung : Pengembangan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan

Kegiatan pendukung : Pembangunan dan pemugaran sarana benda cagar
budaya

Jumlah Anggaran : Rp. 1.278.000.000,-

Realisasi : Rp. 1.270.140.000,-

Persentase : 99.39%

Warisan budaya dan seni merupakan nilai sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah mengikuti perkembangan zaman. Upaya pelestarian terhadap karya seni dan budaya warisan juga perlu dilakukan agar dapat menarik minat wisatawan baik dari luar maupun dalam negeri untuk berkunjung dan mempelajari sejarah suatu daerah.

Beberapa situs sejarah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe saat ini berdasarkan data dari Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe antara lain sebagai berikut:

Kecamatan Banda Sakti;

- a. Tiang tempat Teuku Chik Di Tunong dieksekusi, di Kampung Jawa Lama
- b. Benteng (Kurok-rok) Tentara Jepang, di Ujong Blang
- c. Makam Teungku Lhokseumawe, di Banda Masen
- d. Makam Teuku Chik Di Tunong, di Mongeudong
- e. Meriam Belanda, di Kutablang
- f. Tugu Perlawanan Tentara Indonesia melawan Tentara Laut dan Udara Belanda, di Hagu Selatan

Kecamatan Muara Satu;

- a. Makam Putroe Neng, di Blang Pulo
- b. Makam Tgk. Syiah Hudam, di Blang Pulo
- c. Gua Ibrahim Tapa dan Cot Bukulah, di Blang Panyang
- d. Gua Jepang, di Blang Panyang
- e. Makam Tgk. Chik Di Paloh, di Cot Trieng
- f. Makam Tgk. Jrat Meuindram, di Cot Trieng
- g. Makam Tgk. Chik Buket Bruek Krueng, di Cot Trieng

Kecamatan Muara Dua;

- a. Rumoh Adat Ulee Balang Kuta Kareung, di Meunasah Mesjid
- b. Tugu Perlawanan TKR melawan Tentara Jepang, di Peukan Cunda.

Kecamatan Blang Mangat;

- a. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng, di Blang Buloh
- b. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng, di Blang Buloh
- c. Mon Tujoh, di Buket Rata
- d. Makam Mualim Taufiq Shaleh, di Blang Weu Baroh.

Dari sekian banyak situs sejarah yang terdapat di wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe, pada Tahun 2017 hanya 1 situs sejarah yang dapat dilestarikan oleh Pemerintah setempat. Selain dikarenakan kondisi situs sejarah tersebut yang memang sudah rusak berat termakan usia, factor keterbatasan dana dimana deficit yang cukup besar dialami Pemerintah Kota Lhokseumawe mengharuskan kegiatan pelestarian situs sejarah tersebut dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas.



Gambar : Taman Wisata Gua Jepang yang menjadi objek wisata Kota Lhokseumawe

Capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Dari target yang ditetapkan sebanyak 1 jenis situs sejarah yang dilestarikan terealisasi sebanyak 1 jenis yaitu: Pelestarian Gua Jepang yang terdapat di Blang Pulo Kecamatan Muara Satu. Dengan dilestarikannya situs sejarah ini, terlihat pula terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kota Lhokseumawe.

3. Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif;

Program pendukung : Pembangunan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan pendukung : Sanggar Pocut Meurah Inseun Kota Lhokseumawe

Jumlah Anggaran : Rp. 112.600.000,-

Realisasi : Rp. 106.587.000,-

Persentase : 94.67%

Sanggar seni tari Pocut Meurah Inseun didirikan pada 26 Juni 2007 dengan misi melestarikan seni budaya tradisional. Sejak didirikan, sanggar ini telah banyak menuai prestasi baik di dalam maupun luar negeri. Sanggar tari ini dibina oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan kerap tampil pada saat penerimaan kunjungan tamu daerah yang berkunjung ke Kota Lhokseumawe maupun acara-acara pemerintahan lainnya.

Sasaran 4 : Mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami;

Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya membentuk masyarakatnya yang berkarakter islami dan menerapkan prinsip-prinsip syariat islam dalam tatanan kehidupan, sehingga kualitas manusia dapat terwujud sesuai amanah yang terkandung dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya yang menjadikan Aceh sebagai Bumi Serambi Mekkah.

Pada Tahun 2017, sasaran ini diperkuat dengan 5 (lima) indikator kinerja sehingga dapat terlihat capaian kinerja untuk sasaran ini adalah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi **82%**. Adapun evaluasi dan hasil pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran 4
“mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
4.1	Rasio ketersediaan Dayah dan Santri	%	1	0.5330	53%	0.007	0.006	87%
4.2	Rasio ketersediaan Tengku/Guru dan Santri	%	10	5.5437	55%	0.07	0.059	89%
4.3	Rasio ketersediaan balai pengajian di gampong	%	10	9.5	95%	0.025	0.019	78%
4.4	Pembinaan Hafidz&Hafidzah Kota Lhokseumawe	org	1000	855	86%	56	49	88%
4.5	Peningkatan penerimaan zakat	%	0	0	0%	100%	87%	87%
Rata-rata Capaian					78%			86 %
Kategori Capaian.....					BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian indikator kinerja untuk sasaran 4 adalah sebagai berikut:

1. Rasio ketersediaan Dayah dan Santri;

Program pendukung : Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Dayah

Kegiatan pendukung : Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah

Jumlah Anggaran : Rp. 425.000.000,-

Realisasi : Rp. 424.936.250,-

Persentase : 100%

Pendidikan di Aceh umumnya tidak terlepas dari peran dayah. Dayah merupakan simbol pengembangan Islam sekaligus Lembaga Pendidikan tertua yang menghasilkan ulama-ulama yang berkualitas dan dihormati masyarakat umumnya, khususnya bagi umat muslim. Keistimewaan Aceh untuk menyelenggarakan UUPA memberi peluang yang besar bagi Aceh untuk mengembangkan pendidikan dayah sebagai langkah memperkuat syariat islam yang merupakan ciri khas wilayah Aceh.



Gambar :Dayah modern di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh, khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe mengupayakan membentuk generasi muda yang berkualitas dan memiliki karakter islam, salah satunya adalah mendukung kegiatan pada sejumlah dayah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 56 unit yang tersebar pada masing-masing kecamatan.

Adapun jumlah seluruh santri yang mengikuti pembelajaran dan tersebar pada tiap dayah tersebut sebesar 9.676 orang. Indikator ini memperoleh capaian kinerja hanya sebesar 87%, dimana rasio yang ditargetkan adalah 1 dayah / 150 org santri.

2. **Rasio ketersediaan Tengku/Guru dan Santri;**

Upaya menciptakan generasi yang berkualitas dan memiliki karakter islam tentunya harus didukung pula oleh guru di dayah atau lekat disebut Tengku di wilayah Aceh pada umumnya. Jumlah Tengku yang ada saat ini dan tersebar di setiap dayah dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 572 orang dibanding dengan jumlah santri sebanyak 9.676 orang sehingga diperoleh rasio sebesar 0.059.

Berdasarkan target yang ditetapkan 0.07 atau 1 tengku / 20 santri maka diperoleh persentase capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 89%.

3. Rasio ketersediaan balai pengajian di gampong;

Upaya serius dari Pemerintah Kota untuk menjadikan masyarakatnya berkualitas dan memiliki karakter islam juga dibuktikan dengan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di balai pengajian. Secara umum, setiap gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai balai pengajian yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah balai pengajian yang dimiliki saat ini adalah 686 unit pada 68 gampong dengan jumlah santri yang terdata sebanyak 35.273 orang. Untuk mengukur rasio indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah ketersediaan balai pengajian per jumlah santri yang ada. Rasio yang dihasilkan indikator ini adalah 0.019 dengan target yang ditetapkan sebesar 0.025.

Berdasarkan realisasi yang diperoleh, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 78%.

4. Pembinaan terhadap Hafidz & Hafidzah Kota;

Kekhasan Aceh dalam penyelenggaraan syariat islam di wilayah pemerintahannya, sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUPA menjadikan Aceh khususnya Kota Lhokseumawe sangat peduli dengan generasi penerusnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pembinaan terhadap hafidz dan hafidzah sebagai upaya mewujudkan masyarakatnya berkualitas dan berkarakter islami.

Berdasarkan data dari Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, jumlah Hafidz dan Hafidzah yang dibina oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe saat ini sebesar 56 orang yang dikirim untuk mengikuti lomba MTQ tingkat Propinsi yang diselenggarakan di Aceh Timur. Dari 56 peserta yang diikutsertakan, terealisasi 49 orang yang lolos seleksi untuk mengikuti perlombaan MTQ pada semua cabang. Sehingga persentase capaian kinerja indikator ini adalah 88%.

5. Peningkatan Penerimaan Zakat;

Dana Zakat merupakan salah satu bentuk Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kota Lhokseumawe.

Pada Tahun 2017, realisasi penerimaan pajak yang masuk kedalam PAD Kota Lhokseumawe adalah Rp. 6.093.169.186,-. Capaian kinerja indikator ini adalah 87% dimana target awal yang ditetapkan adalah sebesar 7 milyar rupiah.

Sasaran 5 : Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

Upaya mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe, hal ini juga dapat mewujudkan struktur perekonomian yang unggul dan berkualitas. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui sasaran ini berupaya membangun struktur perekonomian yang kompetitif dan menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai basis aktivitas ekonomi. Pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebesar **55%** dengan indikator pendukung sebanyak 4 (empat) indikator yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran 5
“mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
5.1	Pertumbuhan PDRB							
	Migas	%	2.36	1.33	56%	2.46	0.1	4%
	Non Migas	%	6.45	1.51	23%	7.12	0.2	3%
5.2	Persentase koperasi aktif	%	83.09	39.68	48%	88%	32%	37%
5.3	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	1895	1901	100%	1895	2840	150%
5.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	14.71	11.76	80%	14.71	11.76	80%
Rata-rata Capaian					61%			55 %
Kategori Capaian.....					KURANG			KURANG

Analisis pencapaian indikator kinerja untuk sasaran 5 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB Migas dan Non Migas;

PDRB ADHB dengan migas mengalami pergerakan naik dan turun setiap tahunnya. Tahun 2015 nilainya mencapai 7,63 trilliun rupiah dan di Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 7,73 trilliun rupiah. Target yang diharapkan pada tahun ini adalah naik sebesar 2.46% namun realisasi hanya mencapai kenaikan sebesar 0.1%. Sehingga capaian kinerja pertumbuhan PDRB migas adalah sebesar 4%.

Untuk PDRB ADHB dengan tidak memperhitungkan migas (Non Migas) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari target yang diharapkan naik sebesar 7.12 % namun realisasi hanya dapat naik sekitar 0.2 %. Pada Tahun 2015 angkanya mencapai 6,27 Trilliun sedangkan di Tahun 2016 menjadi 6,47 Trilliun Rupiah. Capaian kinerja pertumbuhan PDRB non migas adalah 3%.

2. Persentase Koperasi Aktif;

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe akan melakukan pembubaran terhadap koperasi yang tidak aktif lagi bahkan vakum kegiatannya. Hal tersebut dilakukan sebagai pemutakhiran data jumlah koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe yang masih aktif dan menyampaikan laporan kegiatannya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

Pada Tahun sebelumnya, Pemerintah sudah berupaya menyurati dan menghubungi unit koperasi tersebut agar menggelar rapat tahunan (RAT) namun hingga saat ini hanya 83 koperasi yang menyerahkan laporan kegiatannya. Jumlah populasi aktif pada tahun ini hanya sebesar 32%. Jumlah koperasi yang ada di wilayah pemerintahan Kota Lhokseumawe sebanyak 257 Koperasi dan hanya 83 koperasi yang merupakan Koperasi Aktif. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 37% dikarenakan target yang diharapkan adalah sebesar 88%.

3. Jumlah usaha mikro dan kecil;

Pemerintah Kota Lhokseumawe mengaku tetap konsisten dalam mengembangkan produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Namun salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama melalui pertumbuhan UKM tentunya secara general akan membutuhkan biaya-biaya untuk pembinaan dan lainnya.

Pada Tahun 2017, jumlah UMKM yang terdata pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 2.840 unit. Dibanding dengan target yang ditetapkan sebanyak 1.895 unit, angka realisasi tersebut sangatlah besar sehingga mencapai persentase sebesar 150%.



Gambar : Salah satu produk UMKM yang dipamerkan pada Gampong Expo Pemerintah Kota

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Lhokseumawe meningkat pesat. UMKM sangat berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan.

Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program pendukung : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan pendukung : Pembinaan Pengembangan PKK

Jumlah Anggaran : Rp. 253.436.200,-
Realisasi : Rp. 209.437.600,-
Persentase : 82.64%

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan membangun keluarga sejahtera, PKK hadir untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai pelatihan seperti menjahit, bordir, anyaman dan kerajinan lainnya.

Hidup sejahtera menjadi impian setiap keluarga, karena itu PKK harus lebih eksis dan menyentuh kepada masyarakat terutama kaum ibu. seluruh kader dan penggerak PKK baik di tingkat kecamatan maupun desa harus memiliki kemampuan (skill) di bidang kerajinan tangan. Keterampilan tersebut untuk ditransfer kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi keluarga.

Indikator ini menjadi salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe. Melalui pembinaan kelompok Pkk diharapkan dapat mendorong kaum perempuan untuk berkarya dan berpenghasilan guna peningkatan ekonomi rumah tangganya.

Pada Tahun 2017, sebanyak 8 dari 68 kelompok PKK yang dibina oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe. Capaian kinerja indikator ini adalah 80%.

Sasaran 6 : Menurunnya angka kemiskinan;

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial diwujudkan melalui pemberdayaan kemandirian masyarakat dan perluasan lapangan usaha serta penyediaan fasilitas usaha mikro. Penurunan kemiskinan lebih ditekankan dengan kemandirian masyarakat untuk berusaha dan tentunya dengan dukungan pemerintah khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe yang kian meningkat tidak terlepas dari tiga dimensi penentu IPM yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang baik. Kedua hal tersebut juga menjadi fokus keseriusan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membangun masyarakatnya agar terbebas dari garis kemiskinan. Capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar **86%** dan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran 6
“menurunnya angka kemiskinan”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
6.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe	angka absolut	80	75.11	94%	78	75.78	97%
6.2	Kelancaran Penyaluran Raskin	RTS	0	0	56%	7200	7164	100%
6.3	Tingkat pengangguran terbuka	%	6.96	0.26	96%	6.55	7.36	88%
6.4	Rasio penduduk yang bekerja (persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan)	%	0.52	0.19	36%	92.06	61.78	67%
6.5	Angka partisipasi angkatan kerja	%	81.46	46.09	57%	89.81	73.34	82%
6.6	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani	%	0	0	0%	100%	95%	95%
Rata-rata Capaian					77%			88 %
Kategori Capaian.....					BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian indikator kinerja untuk sasaran 6 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe;

Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe menempati posisi kedua di seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Propinsi Aceh. Setelah Banda Aceh dengan nilai IPM sebesar 83,73, Kota Lhokseumawe dengan nilai IPM sebesar 75,78 yang mengalami peningkatan setiap tahun dengan kecepatan kenaikan 0,67%.

Persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 97% dimana target nilai IPM yang ditargetkan adalah 78.

Peningkatan nilai IPM ini merupakan kemajuan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memenuhi ketiga dimensi pendukung nilai IPM tersebut yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Pemenuhan ketiga dimensi tersebut juga dapat terlihat pada sasaran 9 dan 11 Laporan Kinerja ini, dimana capaian ketiga dimensi tersebut sangat baik diatas 90%.

2. Kelancaran Penyaluran Raskin;

Program pendukung : Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan

Kegiatan pendukung : Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin

Jumlah Anggaran : Rp. 411.710.000,-

Realisasi : Rp. 407.177.900,-

Persentase : 98.90%

Dalam rangka pemenuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melaksanakan program raskin sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

Penyaluran Raskin yang saat ini menjadi Rastra (Beras Sejahtera) dilakukan setiap 3 Bulan sekali atau 4 (empat) triwulan dalam 1 (satu) tahun. Pemerintah Kota Lhokseumawe mensosialisasikan Program Subsidi Raskin di 4 (empat) kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe,

yang di hadiri oleh para Geuchik dan Petugas Penyaluran Raskin pada 68 Gampong pada wilayah Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun yang bertujuan untuk menjelaskan maanfaat dan subsidi beras oleh pemerintah kepada mesyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran (RTS), Peningkatan akses pangan baik secara fisik dan ekonomi serta memberikan stabilitas harga beras dipasaran, pengendalian inflasi dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar: Penyerahan Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Oleh Wakil Walikota Lhokseumawe

Pada Tahun 2017, capaian kinerja indikator ini sangat baik dimana dari 7.200 RTS /KK yang ditargetkan menerima Raskin, terealisasi sebanyak 7.164 RTS / KK yang terbagi pada 4 Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Blang Mangat sebanyak 1.415 RTS/KK,

Kecamatan Muara Dua sebanyak 1.648 RTS/KK,

Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2.278 RTS/KK, dan

Kecamatan Muara Satu sebanyak 1.823 RTS/KK.

Capaian kinerja yang diperoleh indikator ini adalah 100%. Pemerintah Kota Lhokseumawe akan semakin mengurangi jumlah masyarakat miskin di wilayahnya melalui program bantuan raskin ini setiap tahunnya. Penyaluran Raskin ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menekan angka kemiskinan di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3. Tingkat pengangguran terbuka;

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pada Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kota Lhokseumawe adalah 7.36% dan target yang ditetapkan sebesar 6,55%, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 88% dengan menggunakan penghitungan rumus kedua dimana realisasi indikator melebihi target yang ditetapkan, dan indikator ini merupakan indikator dengan pencapaian negative. Artinya semakin tinggi realisasi semakin buruk capaian kinerjanya.

Jumlah pengangguran terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 terdata sebesar 8.141 orang, sedangkan jumlah penduduk usia angkatan kerja yang terdata adalah sebesar 110.659 orang. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Oleh Karenanya, indikator ini harus benar-benar dapat tercapai dengan baik dalam artian Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih serius menangani pengangguran di wilayah pemerintahannya.

4. Rasio penduduk yang bekerja (persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan);

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebesar 68.367 orang, sementara penduduk usia angkatan kerja sebesar 110.659 orang. Rasio yang ditargetkan tahun ini adalah 92.06 dan realisasi yang tercapai 61.78 sehingga persentase capaiannya adalah 67%.

Rendahnya persentase indikator ini menandakan Pemerintah sudah seharusnya mencari jalan keluar untuk mengatasi besarnya jumlah

pengganguran di wilayah Kota Lhokseumawe yang berdampak pada minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan belum dapat menekan angka kemiskinan.

5. Angka partisipasi angkatan kerja;

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Untuk Tahun 2017, jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Lhokseumawe adalah 73,34% yang diperoleh dari jumlah angkatan kerja 15 Tahun ke atas sebesar 145.273 jiwa dibanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 198.088 jiwa.

Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 82% dimana target yang ditetapkan adalah 89,81% angka partisipasi angkatan kerja.

6. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani;

Program pendukung : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan pendukung : - Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana
- Respon Kasus (Tanggap Darurat Anak PMKS)

Jumlah Anggaran : Rp. 93.650.000,-

Realisasi : Rp. 42.441.210,-

Persentase : 45.32%

Upaya peningkatan kompetensi PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu melalui pembinaan serta pemberian pelatihan dan konsultasi kepada PMKS tersebut. Selain pembinaan, sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2017 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapat dukungan dari DPRK setempat dan Kementerian Sosial RI yang memfokuskan penyandang disabilitas dan Lansia menjadi peserta PKH (Program Keluarga Harapan) Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan jadup (jatah hidup) bagi 518 masyarakat

berumur 70 tahun ke atas berupa uang Rp 300 ribu per bulan. Penyaluran dilakukan ke rekening masing-masing penerima tiga bulan sekali atau empat kali pencairan dalam setahun.

Namun, pada Tahun 2017 penyaluran jadup ini sempat mengalami kendala dikarenakan terjadinya defisit anggaran pada Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang menjadikan dana jadup hanya dianggarkan untuk 5 (lima) bulan saja (Januari-Mei) dengan total anggaran sebesar Rp. 3,5 miliar.



Gambar : Penyerahan bantuan dana Jadup (Jatah Hidup) kepada salah seorang Lansia oleh Walikota Lhokseumawe

Sasaran 7: Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang berbasis komoditi unggulan;

Untuk menghasilkan komoditi unggulan, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya menetapkan program-program yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Produktivitas yang tinggi dan berbasis komoditi unggulan dari petani lokal diharapkan dapat menekan masuknya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan dari daerah lain yang justru mempengaruhi pendapatan masyarakat dan perekonomian di wilayah Kota Lhokseumawe.

Capaian kinerja untuk sasaran ini adalah **90%**, dengan evaluasi pencapaian disajikan pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Sasaran 7
‘meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang berbasis komoditi unggulan’

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
7.1	Persentase penanggulangan penyakit ternak	%	0	0	0%	100	90	90%
7.2	Pengembangan budidaya perikanan	terlaksana	0	0	0%	Terlaksana	Terlaksana	100%
7.3	Cakupan binaan Kelompok Nelayan	klp	0	0	0%	5	4	80%
Rata-rata Capaian					0%			90 %
Kategori Capaian.....					KURANG			SANGAT BAIK

Analisa pencapaian kinerja indikator untuk sasaran 7 adalah sebagai berikut:

1. Persentase penanggulangan penyakit ternak;

Program pendukung : Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Kegiatan pendukung : Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah Anggaran : Rp. 115.300.000,-

Realisasi : Rp. 115.300.000,-

Persentase : 100%

Salah satu upaya peningkatan produksi ternak yaitu dengan mencegah masuknya penyakit dan mencegah tersebarnya penyakit di setiap daerah lalu lintas ternak serta melaksanakan pengawasan.

Upaya pencegahan penyakit ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan pada Tahun 2017 yaitu pemberian vaksin terhadap 585 ternak dari 650 ternak yang terdata atau sekitar 90%. Pemberian vaksin kepada hewan

ternak ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pengembangan budidaya perikanan;

Program pendukung : Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan pendukung : Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Jumlah Anggaran : Rp. 619.771.000,-

Realisasi : Rp. 95.000.000,-

Persentase : 15%

Program pendukung : Pengembangan Budidaya Perikanan

Kegiatan pendukung : Pengembangan Budidaya Udang Windu (Pilot Project)

Jumlah Anggaran : Rp. 149.871.000,-

Realisasi : Rp. 134.871.000,-

Persentase : 90%

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe memprioritaskan pengembangan budi daya udang windu. Budidaya udang windu banyak dilakukan di wilayah pertambakan Kecamatan Blang Mangat dimana daerah tersebut komoditas udang windu sebagai salah satu andalan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang teknik pembudidayaan secara baik dan benar sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan menjadikan udang windu sebagai komoditas unggulan di wilayah Kota Lhokseumawe.

Capaian kinerja indikator ini adalah 100% dimana pendampingan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan lancar agar petani dapat lebih paham tentang cara pembudidayaan udang yang baik dan benar.

3. Cakupan binaan kelompok nelayan;

Program pendukung : Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Kegiatan pendukung : Peningkatan Kemampuan Lembaga Nelayan

Jumlah Anggaran : Rp. 54.000.000,-

Realisasi : Rp. 54.000.000,-

Persentase : 100%

Untuk meningkatkan peranan petani/nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan, khususnya dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan pertanian/perikanan diwilayahnya, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dibentuk sebagai wadah aspirasi dan musyawarah masyarakat petani-nelayan.

KTNA sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pertanian diarahkan untuk berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan Kelompok KTNA, yaitu :

- Melaksanakan kerjasama petani-nelayan
- Menyampaikan aspirasi petani-nelayan kepada pemerintah
- Memperoleh kebijakan pemerintah
- Menyiapkan/menumbuhkan kader-kader kontak tani-nelayan andalan.

Untuk mendukung kegiatan KTNA tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memberikan bantuan operasional kepada 4 dari 5 kelompok nelayan beserta panglima laot agar dapat meningkatkan produksi pangan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian kinerja indikator ini adalah 80%.

Sasaran 8 : Meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata;

Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat serius dalam membenahi sektor pariwisatanya dengan melakukan promosi kunjungan wisata baik dari dalam maupun luar negeri. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah di kota Lhokseumawe Dengan mempromosikan pariwisata

diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di wilayah Kota Lhokseumawe.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilakukan melalui pemungutan pajak dan retribusi yang merupakan penyumbang terbesar bagi PAD Kota Lhokseumawe. Peraturan Daerah (Qanun) tentang pajak maupun retribusi dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat ketentuan dan hukum bagi masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya. Pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Capaian kinerja sasaran ini sebesar **99%** yang dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Sasaran 8
meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
8.1	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2017	rupiah	0	0	85%	Rp. 32,875,450 ,951	Rp. 31,890,248 ,006	97%
8.2	Kunjungan wisata	jiwa	250.000	237.036	95%	229.095	229.095	100%
Rata-rata Capaian					90%			99 %
Kategori Capaian.....					SANGAT BAIK			SANGAT BAIK

Analisa pencapaian kinerja indikator untuk sasaran 8 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2017;

Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan jumlah dan macam pajak sebagai berikut:

NO.	Jenis Pendapatan	Realisasi Penerimaan
1.	Pajak Restoran(Qanun Nomor 01 Tahun 2007)	Rp. 2.703.864.639,-
2.	Pajak Hotel (Qanun Nomor 02 Tahun 2007)	Rp.251.570.700,-
3.	Pajak Reklame(Qanun Nomor 03 Tahun 2007)	Rp. 767.766.745,-
4.	Pajak Penerangan Jalan(Qanun Nomor 04 Tahun 2007)	Rp. 15.574.198.671,-
5.	Pajak Parkir(Qanun Nomor 08 Tahun 2012)	Rp. 8.913.300,-
6.	Pajak Air Bawah Tanah(Qanun Nomor 09 Tahun 2012)	Rp. 1.618.896,-
7.	Pajak Hiburan(Qanun Nomor 12 Tahun 2007)	Rp. 10.800.000,-
8.	Pajak Bahan Galian Golongan C	Rp. 1.116.304.574,-
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp. 3.048.671.118,-
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 4.306.055.841,-
11.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (Qanun Nomor 8 Tahun 2007)	Rp. 530.736.000,-
12.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir (Qanun Nomor 03 Tahun 2016)	Rp. 642.278.000,-
13.	Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran	Rp. 423.835.000,-
14.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 106.577.500,-
15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 564.190.000,-
16.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Qanun Nomor 5 Tahun 2007)	Rp. 552.853.750,-
17.	Retribusi Izin Gangguan (Qanun Nomor 10 Tahun 2007)	Rp. 1.217.700.772,-

18.	Retribusi Terminal (Qanun Nomor 7 tahun 2007)	Rp. 9.500.000,-
19.	Retribusi Izin Usaha Angkutan	Rp. 2.812.500,-
Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2017		Rp. 31,890,248,006

2. Kunjungan Wisata;

Program pendukung : Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan pendukung : Promosi potensi dan obyek pariwisata

Jumlah Anggaran : Rp. 17.948.000,-

Realisasi : Rp. 17.948.000,-

Persentase : 100%

Pada tahun ini, dari target yang ditetapkan sebanyak 229.095 orang, jumlah kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe adalah 229.095 orang. Capaian kinerjanya adalah 100% dengan kategori sangat baik dimana dapat disimpulkan bahwa tingginya minat wisata ke Kota Lhokseumawe.

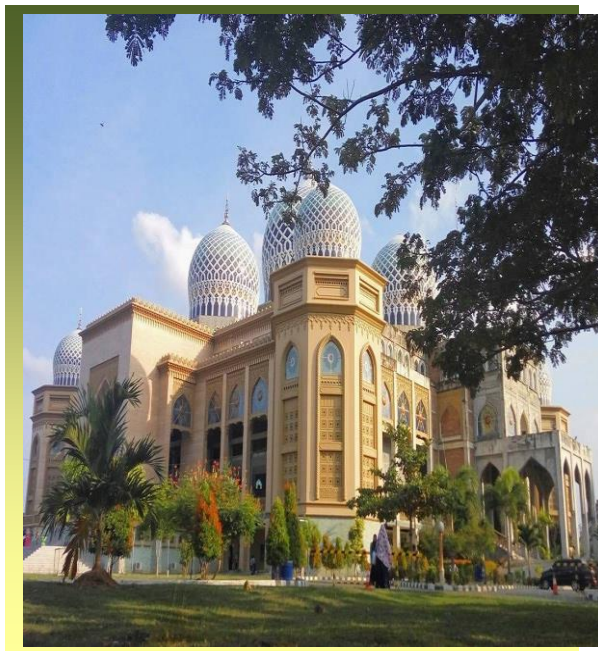
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ini disebabkan keseriusan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membenahi sektor pariwisatanya sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk berkunjung ke wilayah Kota Lhokseumawe.

Pesona alam yang indah dan tertata dengan baik serta sebagai wilayah dengan basis syariat islam yang tinggi juga merupakan faktor yang menarik wisatawan tersebut. Suasana yang kondusif serta meningkatnya sumber perekonomian di wilayah Kota Lhokseumawe juga mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisata di tahun ini. Daya tarik wisata yang memikat wisatawan di Tahun 2017 selain pantai Ujong Blang adalah objek wisata Goa Jepang, Islamic Centre Kota Lhokseumawe dan Waduk Jeulikat Lhokseumawe. Sejak bukit Goa Jepang dipugar dan dilestarikan, banyak wisatawan yang berkunjung untuk menikmati salah satu peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe tersebut. Begitu pula dengan dibukanya waduk jeulikat yang menyimpan pemandangan yang menyejukkan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di halaman waduk

tersebut wisatawan dapat melihat replika “*rumoh adat/panggung*” yang merupakan rumah adat suku Aceh.



Gambar : *Wisata alam Waduk Jeulikat Kota Lhokseumawe*



Gambar : *Islamic Centre Kota Lhokseumawe*

Selain berwisata kuliner khas Aceh, tampilan seni dan budaya Aceh yang memukau pada festival Rapa'l Uroeh Tahun 2017 lalu juga memberi daya tarik bagi wisatawan. Yang tak kalah menarik berkunjung ke Kota Lhokseumawe adalah wisata religi yang ditawarkan Pemerintah setempat. Bangunan Islamic Centre yang berdiri kokoh dan megah di pusat kota merupakan icon tersendiri yang menambah minat dan kunjungan masyarakat ke Kota Lhokseumawe.

Sasaran 9 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas;

Pada sasaran ini telah jelas terlihat keseriusan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu tujuan

pembangunannya. Pendidikan yang berkualitas adalah upaya untuk melahirkan manusia yang cerdas dan berakhlak serta mampu bersaing. Menciptakan Pendidikan berkualitas tinggi merupakan amanah Undang-undang. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran pendidikan penting juga dalam membangun peradaban bangsa yang berdasarkan atas jati diri dan karakter bangsa.

Pada Tahun ini, capaian kinerja sasaran ini adalah sebesar **93%** dengan kategori sanga baik dan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Sasaran 9
“mewujudkan pendidikan yang berkualitas”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
9.1	Persentase Penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf	%	15	15.14	101%	98%	94%	96%
9.2	Angka parsitipasi murni							
	SD/MI/Paket A	%	92.15	81.81	89%	93.99	81.81	87%
	SMP/MTS/Paket B	%	79.79	81.24	102%	80.11	81.24	101%
	SM/MA/Paket C	%	77.24	73.34	95%	77.55	73.34	95%
9.3	Angka Kelulusan							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98.55	99.89	101%	99.87	99.89	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	96.48	99.98	104%	99.13	99.98	101%

	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	98.52	99.91	101%	99.25	99.91	101%
9.4	Persentase guru berpendidikan S1/D4	%	0	0	0%	93.46	87.87	94%
Rata-rata Capaian					87%			97 %
Kategori Capaian.....					SANGAT BAIK			SANGAT BAIK

Analisa pencapaian kinerja indikator untuk sasaran 9 adalah sebagai berikut:

9.1 Persentase Penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf;

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Persentase penduduk usia >15 tahun yang melek huruf di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah 94% dimana jumlah penduduk usia 15 tahun yang bisa menulis terdata sebanyak 128.705 jiwa dibandingkan dengan 136.757 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat buta aksara di wilayah Kota Lhokseumawe semakin berkurang dan makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe setiap tahun.

9.2 Angka partisipasi murni;

Angka partisipasi murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM menunjukkan angka 100 maka seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktunya.

Angka partisipasi murni di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- **Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A** pada tahun ini mencapai 81.81% dari target yang ditetapkan sebesar 93.99%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun tepat pada waktunya berkisar 87%. Dari 23.417 jumlah penduduk usia 7-12 tahun, hanya sebesar 19.157 yang bersekolah pada tahun tersebut.
- **Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B** sudah sangat baik, yaitu dengan capaian 101%. Capaian tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 81.24% per target sebesar 80,11%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10.972 penduduk usia 13-15 tahun, hanya sebesar 8.914 yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2017.
- **Angka partisipasi murni SMA/MA/Paket C** pada Tahun 2017 adalah sebesar 73,34% dengan target yang ditetapkan sebesar 77,55% sehingga memperoleh capaian kinerja sebesar 95%. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe bahwa dari 10.831 jumlah penduduk usia 16-18 tahun, hanya 7.943 penduduk yang bersekolah pada tahun tersebut.

9.3 Angka Kelulusan;

Program pendukung : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan pendukung : Penyelenggaraan UN dan UAS

Jumlah Anggaran : Rp. 59.350.000,-

Realisasi : Rp. 58.580.500,-

Persentase : 98.70%

Angka Kelulusan di wilayah Kota Lhokseumawe meningkat cukup signifikan dan melebihi target terutama pada tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah pada tahun ini sangat termotivasi dalam proses belajar-mengajar sehingga mereka dapat lulus tepat waktu dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Tingginya angka kelulusan ini juga membuktikan keseriusan Pemerintah kota Lhokseumawe dalam meningkatkan derajat pendidikan di wilayah pemerintahannya dan dengan hal ini pula dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia Kota Lhokseumawe semakin baik.

- **SD/MI;**

Angka Kelulusan pada tingkat SD/MI Tahun 2017 mencapai 100% dimana target yang ditetapkan sebesar 98,87% dan terealisasi sebesar 99,89%. Dari 3.483 jumlah siswa kelas 6 yang mengikuti Ujian Nasional (UN), sebesar 3.479 yang lulus ujian tersebut.

- **SMP/MTs**

Realisasi Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs juga melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,13% dari target yang ditetapkan sebesar 99,98% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 101%. Jumlah siswa kelas 9 yang mengikuti ujian UN pada Tahun 2017 adalah sebesar 4.138 orang dan tingkat kelulusannya sebesar 4.137 orang.

- **SMA/SMK/MA**

Untuk Tingkat SMA/SMK/MA, tahun ini tingkat capaiannya adalah sebesar 101% dimana target yang ditetapkan adalah 99,25% dan terealisasi sebesar 99,91%. Dimana dari 3.308 orang siswa kelas 12 yang mengikuti ujian, lulus sebanyak 3.305 orang.

9.4 Persentase guru berpendidikan S1/D4;

Peningkatan mutu pendidikan harus diimbangi antara kualitas guru yang akan mempengaruhi kualitas muridnya. Untuk menciptakan murid yang berprestasi dan berkualitas tentunya harus mempunyai guru yang cerdas

dan berkompeten. Jumlah guru yang sudah menyelesaikan pendidikan Sarjana/Diploma 4 per Desember 2017 adalah 3.761 orang dari 4.280 jumlah guru seluruhnya di Kota Lhokseumawe atau sebesar 87.87%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sekitar 13 % dari jumlah guru yang belum menyelesaikan studinya sampai tingkat sarjana. Capaian kinerja indikator ini adalah 94% dimana target yang ditetapkan adalah 93.465 guru yang berpendidikan S1/D4.

Sasaran 10 : Menciptakan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga;

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul dalam menciptakan bangsa yang kuat dan Negara yang makmur. Pembangunan pemerintah dibidang kepemudaan dapat dimaknai sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sementara pembangunan Olahraga dimaknai sebagai strategi yang sistematis untuk meningkatkan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai manusia bugar, sehat, dan berprestasi dengan memasukkan unsur kebutuhan olahraga ke dalam kebijakan dan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam rangka menciptakan SDM di bidang Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pembinaan terhadap organisasi pemuda maupun olah raga yang keduanya merupakan indikator untuk tercapainya sasaran ini. Sasaran ini menjadi strategis dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan harapan dapat diraihinya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang bugar, sehat, dan berprestasi di bidang olahraga.

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Sasaran 10
“menciptakan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
10.1	Pembinaan terhadap organisasi pemuda	klp	100	83	83%	68	68	100%
10.2	Pembinaan terhadap organisasi olahraga	klp	150	134	89%	159	159	100%
Rata-rata Capaian					90%			100 %
Kategori Capaian.....					SANGAT BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian kinerja indikator pada sasaran 10 adalah:

1. Pembinaan terhadap organisasi pemuda;

Perkembangan organisasi kepemudaan di Lhokseumawe sangat baik, dengan capaian kinerja 100%. Dimana dari target indikator yang ditetapkan terlaksananya pembinaan bagi sebanyak 68 kelompok pemuda dan terealisasi sejumlah 68 kelompok pemuda.

2. Pembinaan terhadap organisasi olahraga;

Program pendukung : Pembinaan dan Pemyarakatan Olahraga

Jumlah Anggaran : Rp. 953.711.800,-

Realisasi : Rp. 949.293.050,-

Persentase : 99.54%

Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat mempengaruhi berkembangnya organisasi olahraga di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 jumlah organisasi olahraga di wilayah Kota Lhokseumawe adalah sebesar 159 kelompok. Capaian kinerja indikator ini adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 11 : Mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal;

Pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun masih ada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, baik SDM maupun masalah regulasi dan masalah teknis lainnya.

Pemerintah Kota Lhokseumawe menjadikan kembali pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai pemberi layanan promotif dan preventif dengan sasaran kelompok dan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe pada umumnya dikarenakan belum adanya Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Capaian kinerja untuk sasaran ini adalah sebesar **94%** yang didukung oleh 7 indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Sasaran 11
“mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
11.1	Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 pddk	0.04	0.031	77%	0.04	0.03	75%
11.2	Cakupan Kunjungan Bayi	%	0	0	0%	100	87.92	88%
11.3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100%	100	100	100%
11.4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru	%	100	37.18	37%	100	100	100%

11.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100%	100	100	100%
11.6	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000	997.71	995.1	100%	1000	996.07	100%
11.7	Angka usia harapan hidup	tahun	72.59	70.96	98%	73.57	71.05	97%
Rata-rata Capaian					70%			94%
Kategori Capaian.....					BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian kinerja indikator pada sasaran 11 adalah sebagai berikut:

1. Rasio pukesmas per satuan penduduk;

Program pendukung : Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;

Jumlah Anggaran : Rp. 20.809.871.265,-

Realisasi : Rp. 19.123.760.155,-

Persentase : 91.90%

Pelayanan Kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe dilayani oleh 6 (enam) Puskesmas yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan. Rasio jumlah Puskesmas per penduduk Tahun 2016 sebesar 0.031 dengan target yang ditetapkan adalah 0,04. Capaian kerjanya adalah 77% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah puskesmas yang dimiliki Pemerintah Kota Lhokseumawe masih belum cukup untuk melayani jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang mencapai 198.088 orang.

2. Cakupan Kunjungan bayi;

Cakupan kunjungan bayi merupakan kunjungan bayi umur 1 – 12 bulan di sarana pelayanan kesehatan pada posyandu, tempat penitipan anak dan pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit melalui kunjungan petugas kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh petugas

kesehatan untuk mendeteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi, stimulasi perkembangan bayi, manajemen terpadu balita sakit dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu 29 hari- 3 bulan , 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan dan 1 kali pada umur 9-12 bulan.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi meliputi imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, campak) . Imunisasi diberikan kepada bayi sesuai kebutuhannya untuk menjamin tingkat kesehatannya menjadi lebih baik lagi. Pada Tahun ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan kesehatan kepada bayi dengan target kepada 4.322 bayi yang lahir pada Tahun 2017 dan terealisasi hanya 87.92% atau hanya sebanyak 3.800 bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Capaian kinerja indikator ini adalah 88%.

3. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan;

Program pendukung : Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Anggaran : Rp. 1.040.878.653,-

Realisasi : Rp. 705.258.900,-

Persentase : 67.76%

Semua kasus gizi buruk yang teridentifikasi mendapatkan perawatan yang baik, capaiannya adalah 100% dengan jumlah kasus gizi buruk 5 kasus dan kesemuanya mendapatkan perawatan yang sama oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. Kasus ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai kasus sebanyak 10 kasus.

4. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru;

Program pendukung : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan pendukung : Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang percepatan penanggulangan penyakit TB

Jumlah Anggaran : Rp. 97.241.558,-

Realisasi : Rp. 85.260.000,-
Persentase : 87.68%

Untuk meminimalisir Kasus TB (*tuberculosi*s) di Kota Lhokseumawe, sangat penting untuk dilakukan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap penyebab dan bahayanya TB. Semua kasus TB di Kota Lhokseumawe telah di tangani penyembuhan dan pencegahan penularannya. Capaian indikator ini 100% dengan target 88 kasus yang telah teridentifikasi dan terialisasi sebnayak 88 kasus.

Kasus TB di wilayah Kota Lhokseumawe tahun ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencapai angka 116 kasus.

5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;

Program pendukung : Pencegahan dan Penanggulanagn Penyakit Menular

Kegiatan pendukung : Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Jumlah Anggaran : Rp. 315.960.000,-

Realisasi : Rp. 29.946.750,-

Persentase : 9.48%

Pada tahun 2017, kasus DBD masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kasus DBD umumnya menyerang anak-anak dan balita. Namun, kasus DBD tahun ini jauh mengalami penurunan disbanding dengan kasus DBD yang terjadi tahun lalu yang mencapai angka ratusan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, jumlah kasus DBD pada tahun ini adalah sebanyak 95 kasus dan turun secara signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya berkisar 280 kasus. Kasus DBD tahun ini berhasil semuanya ditangani dengan baik sehingga Capaian indikator ini adalah 100%.

6. Angka kelangsungan hidup bayi;

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan imunisasi bagi ibu hamil dan bayi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan angka kelangsungan hidup bayi. Penempatan bidan-bidan yang berkompeten pada pusat layanan kesehatan seperti halnya Pustu pada tiap gampong (desa) juga

merupakan upaya untuk menekan angka kematian bayi yang kerap menjadi masalah dalam komplikasi kebidanan.

Capaian indikator ini 100% dimana target yang ditetapkan adalah dari 4.322 jumlah bayi yang lahir pada Tahun 2017 terealisasi sebesar 4.305 bayi. Kondisi yang terjadi adalah sebanyak 17 bayi yang mengalami kematian di tahun ini. Angka kematian ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai angka 21 bayi yang mengalami kematian.

7. Angka usia harapan hidup;

Usia harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup penduduk dalam satu wilayah tertentu atau waktu hidup yang tersisa. Perolehan angka usia harapan hidup ini didapatkan dari besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi besar, maka usia harapan hidup akan rendah.

Angka usia harapan hidup di Kota Lhokseumawe tergolong tinggi, yaitu 71,05 tahun. Capaian indikator ini 97 % dari target yang telah ditetapkan dengan angka 73,57 tahun.

8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi;

Program pendukung : Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pendukung : Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

Jumlah Anggaran : Rp. 386.000.000,-

Realisasi : Rp. 370.720.000,-

Persentase : 96.04%

Pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi tinggi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi bidan bertujuan untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang menjadi kasus serius yang harus ditekan penurunannya melalui penetapan indikator ini.

Untuk Tahun 2017, capaian indikator ini adalah sebesar 95% dimana target yang ditetapkan adalah 97,09% dan terealisasi sebesar 92.02 persen

yang diperoleh dari 4.265 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap 4.635 jumlah sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Sasaran 12: Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kasus kekerasan dan pelecehan kerap dialami perempuan dan beberapa tahun terakhir. Setidaknya dalam 1 (satu) hari berdasarkan laporan maupun pengaduan masyarakat, 10 perempuan mengalami kekerasan, 1 dari 3 anak laki-laki, dan 1 dari 6 anak perempuan juga mengalami hal yang serupa. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe menyediakan berbagai fasilitasi dan layanan pendampingan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Komitmen tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta melalui penetapan program-program yang mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 3.14
Pencapaian Kinerja Sasaran 12
“meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
12.1	Cakupan peserta KB aktif	%	95.66	81.43	85.13%	91.67	82.91	90%
12.2	Rasio KDRT	%	0.01	0.001	93%	0.019	0.015	80%
12.3	Pembinaan forum komunikasi anak	org	0	0	0%	581	581	100%
12.4	Indeks Pembangunan Gender	%	0	0	0%	98	94.62	97%

12.5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	%	99.9	78.48	79%	97.09	92.02	95%
Rata-rata Capaian					90%			92 %
Kategori Capaian.....					SANGAT BAIK			SANGAT BAIK

Analisis pencapaian kinerja indikator pada sasaran 12 adalah sebagai berikut:

12.1 Cakupan peserta KB Aktif;

Program pendukung : Keluarga Berencana

Jumlah Anggaran : Rp. 1.421.786.000,-

Realisasi : Rp. 1.148.195.781,-

Persentase : 80.76%

Semua pasangan subur tidak menjadi peserta KB aktif. Hanya 82.91% dari pasangan subur yang menjadi peserta KB aktif di tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe, jumlah pasangan usia subur di wilayah Kota Lhokseumawe per Desember 2107 adalah sebesar 29.998 pasangan, sedangkan yang menjadi peserta KB aktif adalah sebesar 24.870 pasangan. Capaian Indikator ini adalah 90%.

12.2 Rasio KDRT;

Program pendukung : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Kegiatan pendukung : Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Jumlah Anggaran : Rp. 1.101.425.010,-

Realisasi : Rp. 1.010.528.550,-

Persentase : 91.75%

Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Lhokseumawe sangat mengupayakan terselenggaranya sosialisasi tentang KDRT bagi seluruh masyarakatnya.

Melalui pemasangan baliho, penyebaran spanduk, ,maupun konsultasi publik yang dilakukan melalui media massa maupun elektronik (radio) kerap dilakukan untuk menurunkan angka KDRT di wilayah Kota Lhokseumawe.

Jumlah kasus KDRT yang ditangani pada Tahun 2017 adalah sebesar 8 kasus dari 53.691 jumlah rumah tangga yang ada di wilayah pemerintah Kota Lhokseumawe atau sekitar 0.015 %.

Capaian kinerja indikator ini sangat baik dengan angka capaian 80% dimana target yang ditetapkan sebesar 0,019 %.

12.3 Pembinaan Forum Komunikasi Anak;

Program pendukung : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Kegiatan pendukung : Peningkatan Kapasitas Forum Anak Daerah

Jumlah Anggaran : Rp. 517.625.000,-

Realisasi : Rp. 502.687.850,-

Persentase : 97.11%

Forum Komunikasi anak adalah organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah daerah dengan anak-anak di wilayah pemerintahan Kota Lhokseumawe sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak.

Forum Komunikasi Anak Lhokseumawe dibentuk dalam rangka meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai luhur budaya bangsa, semangat nasionalisme dan patriotisme serta upaya mendukung anak-anak dalam mengejar dan menggapai cita-citanya di masa depan.

Capaian kinerja indikator ini adalah 100%, dimana realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu pembinaan terhadap 581 anakak yang tergabung dalam forum komunikasi anak Kota Lhokseumawe.

12.4 Indeks Pembangunan Gender;

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pembangunan manusia yang menitik beratkan kepada kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Semakin tingginya nilai IPG maka semakin besar kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Tahun 2017 Kota Lhokseumawe memiliki IPG sebesar 94.26 dari target 98. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan pencapaian kinerja 97

Sasaran 13: Meningkatkan kualitas infrastruktur kota;

Infrastruktur memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur tentunya dilakukan secara merata sampai ke pelosok Gampong (Desa) dan diharapkan mampu menciptakan pemerataan bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program percepatan pembangunan infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkualitas sangat diperlukan Pemerintah Kota Lhokseumawe saat ini. Hal tersebut sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan yang mana salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Capaian kinerja untuk sasaran ini adalah **67%** dengan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Kinerja Sasaran 13
“meningkatkan kualitas infrastruktur kota”

No.	Indikator Kinerja	Satuan Hasil	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
13.1	Penurunan persentase kawasan pemukiman kumuh	%	0.006	0.004	81%	92.12	25.38	28%
13.2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	94.4	90.15	95%	78.8	35.80	45%

13.3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih	%	0	0	0%	89.49	60.54	68%
13.4	Persentase penanganan sampah	%	100	81.48	81%	96.54	82.61	86%
13.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	0	0	0%	1.36	0.69	51%
13.6	Peningkatan jumlah Bangunan yang ber-IMB	unit	2000	1065	53%	100	125	125%
Rata-rata Capaian					76%			67 %
Kategori Capaian.....					BAIK			CUKUP

Analisis pencapaian kinerja indikator pada sasaran 13 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Persentase kawasan permukiman kumuh;

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang terletak dikawasan pesisir dan menjadi target program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Berdasarkan SK Walikota Lhokseumawe Nomor 342/2014 disebutkan bahwa luas Lingkungan permukiman kumuh di wilayah Kota Lhokseumawe adalah 166.79 hektare pada 19 gampong. Berdasarkan data wilayah kumuh dari program Kotaku, tercatat pada akhir Tahun 2017 jumlah gampong yang berkategori kumuh baik sedang maupun ringan menjadi 13 gampong dengan luas kumuh menjadi 120,86 hektare atau berkurang 45,93 hektare.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat serius ingin menjadikan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan mengadakan pilot project penanganan wilayah kumuh sejak tahun 2016 serta menetapkan gampong yang menjadi prioritas penanganannya.

Program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh. Program ini terus diupayakan setiap tahun agar tercapainya sasaran Kota Tanpa Kumuh di Tahun 2019 mendatang. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 28% dimana target yang ditetapkan adalah 92.12% dan terealisasi sebesar 25.38%.

2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik;

Program pendukung : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Anggaran : Rp. 114.358.762.789,-

Realisasi : Rp. 112.385.998.308,-

Persentase : 98,27%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Realisasi panjang jalan di wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 sebesar 35.80% dari target yang ditetapkan sebesar 78.8 %. Dari jumlah panjang jalan 412.468 km total panjang jalan, hanya 147.668 kondisi jalan di wilayah Kota Lhokseumawe yang berkondisi baik.



Gambar : Kondisi jalan di Kota Lhokseumawe yang baik.

Kondisi jalan di wilayah Kota Lhokseumawe umumnya masih dalam kategori rusak, dimulai dari tingkatan rusak ringan, sedang sampai rusak berat. Pada Tahun 2017, beberapa ruas jalan dilakukan perbaikan dan dibangun kembali. Namun tidak dapat dipungkiri, jalan yang telah dibangun dan diperbaiki tersebut terjadi kerusakan kembali yang disebabkan beberapa faktor seperti penggalian pipa PDAM, air yang tergenang karena kurang berfungsinya drainase, pasang gelombang yang terjadi dikarenakan letak Kota Lhokseumawe di bagian pesisir pantai dan sebab lainnya.



Gambar : Kondisi Jalan B.Aceh-Medan (kec.muara dua) dengan kondisi rusak sedang.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengupayakan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan dalam kondisi rusak tersebut dengan menjadikan indikator ini sebagai anggaran prioritas di tahun mendatang. Hal tersebut diupayakan untuk mendukung kelancaran dan mobilisasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 45%.

3. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih;

Program pendukung : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan pendukung : Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Jumlah Anggaran : Rp. 3.551.005.000,-

Realisasi : Rp. 3.456.422.950,-

Persentase : 97.34%

Program pendukung : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan pendukung : Perencanaan Sistem Pengelolaan Jaringan Air Minum
Jumlah Anggaran : Rp. 45.724.000,-
Realisasi : Rp 45.724.000,-
Persentase : 100%

Kebutuhan air bersih untuk masing-masing manusia tergantung pada banyak sedikitnya aktivitas manusia selain itu juga tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan tempat tinggal manusia tersebut. Pada umumnya kebutuhan banyaknya air tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu karakteristik penduduk, kepadatan penduduk, aktivitas dan letak suatu daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain dan berbeda pula dalam hal kebutuhan air bersih, hal ini karena adanya daerah permukiman dan daerah industri yang berarti bahwa daerah dengan permukiman dan industri akan membutuhkan air lebih banyak dari daerah pertanian dan perkebunan.

Melihat kondisi geografis Kota Lhokseumawe, sebesar 60% luasnya merupakan pemukiman penduduk dan sisanya adalah penggunaan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dengan besarnya luas pemukiman penduduk dipastikan kebutuhan air bersih di wilayah ini sangat besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan program pembangunan air bersih yang saat ini sudah beroperasi dan menyuplai air ke lingkungan masyarakat.

Hingga saat ini, air bersih yang dialiri oleh PDAM le Beusare Rata Kota Lhokseumawe masih mencakup wilayah Kecamatan Muara Satu dengan jumlah pelanggan 9.405 jiwa, sementara 3 kecamatan lainnya masih dialiri oleh PDAM Tirta Mon Pasee Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah pelanggan 23.075 jiwa. Capaian kinerja indikator ini adalah 60,54% dimana dari 53.651 jumlah Rumah Tangga dalam wilayah Kota Lhokseumawe, sebesar 32.480 yang telah menggunakan air bersih.

4. Persentase penanganan sampah;

Program pendukung : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan pendukung : Penyediaan Sraana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah Anggaran : Rp. 478.562.500,-
Realisasi : Rp. 361.636.090,-
Persentase : 75,57%

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyuluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sebagian besar produksi sampah di Kota Lhokseumawe didominasi jenis organik, seperti daun pepohonan, kulit buah-buahan, sayuran busuk dan sisa-sisa kotoran ikan. Produksi sampah itu lebih didominasi dari pasar yang ada dalam wilayah Kota Lhokseumawe, bila dibandingkan dengan produksi sampah dari pemukiman warga. Untuk sampah nonorganik, seperti plastik, botol bekas minuman, dan logam telah terlebih dahulu diambil oleh pemulung pada tempat-tempat penampungan sementara, untuk dijual.

Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, diupayakan dengan cukup serius dalam pengelolaannya. Jumlah armada yang melayani penanganan sampah di Kota Lhokseumawe adalah sebanyak empat truk Aram Rol dan ditambah delapan unit truk pengangkut, sedangkan kegiatan pengangkutan sampah dilakukan dalam dua sift setiap harinya, yaitu pagi dan sore hari. Sementara lokasi pembuangan akhir dilakukan di TPA Alue Liem, Kecamatan Blang Mangat.

Dari jumlah volume sampah sebesar 114.875 m³ yang berhasil tertangani adalah sebesar 94.895 m³ atau sekitar 82.61%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 96.54% maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 86%.

5. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan wilayah ber HPL/HGB;

Program pendukung : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Anggaran : Rp. 172.749.700,-

Realisasi : Rp. 172.477.700,-

Persentase : 99,84%

Pembangunan fisik tak jarang menimbulkan banyak masalah seperti kepadatan bangunan, kepadatan guna lahan bahkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian khusus untuk pengembangan kualitas lingkungan melalui pengembangan kota hijau dengan berfokus kepada peningkatan kualitas lingkungan, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), dan diterapkannya unsur infrastruktur hijau sebagai unsur utama kota hijau.

Luas ruang Terbuka Hijau Kota Lhokseumawe saat ini hanya mencapai angka 0.69% dimana target yang ingin dicapai adalah 1.36%. Dari 3.671 m² luas wilayah ber HPL/HGB, hanya sebesar 25.4 m² luas Ruang Terbuka Hijau Kota Lhokseumawe. Hal ini berarti Kota Lhokseumawe masih membutuhkan pengembangan konsep kota hijau sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

6. Peningkatan jumlah bangunan yang ber-IMB;

Program pendukung : Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 217.059.000,-

Realisasi : Rp. 214.557.500,-

Persentase : 98.85%

Untuk Tahun ini jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB bertambah sebesar 125 unit dari tahun lalu yang berjumlah sebesar 1.065 unit. Dari target penambahan yang ditetapkan sebesar 100 unit, realisasinya melebihi target sehingga capaian indikator ini adalah 125%. Peningkatan jumlah bangunan ber-IMB tahun ini yang melebihi target merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sudah mulai mematuhi dan mengetahui manfaat dengan adanya IMB tersebut.

Manfaat telah memiliki IMB diantaranya pemerintah akan membayar ganti rugi atas bangunan yang beralih fungsi menjadi fasilitas umum atau terkena pelebaran jalan.

Dengan membayar retribusi IMB berarti masyarakat telah ikut menyumbang dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe.

3.1.2 ANALISIS PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Pencapaian Indikator kinerja dari sasaran Tahun 2017 mengalami peningkatan dan penurunan. Pencapaian sasarannya pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6% dibanding tahun sebelumnya. Rekapitulasi capaian kinerja sasaran di Tahun 2017 menurut kategori pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Kategori Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

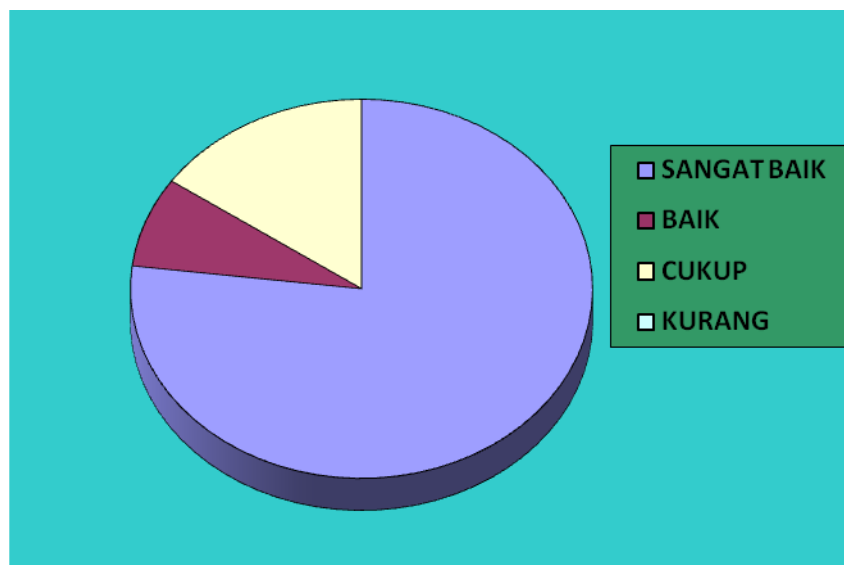
No.	Uraian Sasaran	Tingkat Capaian
SANGAT BAIK		
1.	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tata-tatanan kehidupan;	100%
2.	Menciptakan SDM pada Bidang Pemuda dan Olahraga;	100%
3.	Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;	99%
4.	Meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata	99%
5.	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas	97%
6.	Mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal;	94%

7.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;	92%
8.	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang berbasis komoditi unggulan;	90%
9.	Mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami;	86%
10.	Menurunnya angka kemiskinan	86%
BAIK		
11.	Mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja;	78%
CUKUP		
12.	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota;	68%
13.	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.	64%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 13 sasaran yang ditetapkan yang mendapatkan kategori **SANGAT BAIK** sebanyak 10 sasaran, yang mendapat kategori **BAIK** 1 sasaran, dan kategori **CUKUP** 2 sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe cukup berhasil dalam menjalankan program-program yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah meskipun dalam kondisi defisitnya anggaran. Hampir seluruh program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari program-program pemerintah Kota Lhokseumawe periode sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun ini jumlah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis berkurang menjadi 135 program dibandingkan dengan Tahun 2016 sebanyak 175 program. Sistem Akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe berhasil mengurangi dan mengefisienkan 40 program atau sekitar 23% atas penghematan anggaran.

Meskipun demikian, capaian kinerja terhadap indikator-indikator kinerjanya hampir seluruhnya mendapatkan kategori pencapaian yang baik. Artinya bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe tetap dapat menjalankan target-target indikator kinerja dengan penggunaan anggaran sefisien dan sehemat mungkin sehingga tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2017 ini tercapai dengan cukup baik. Berikut kami sajikan diagram pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017:



Gambar 3.1 Diagram Capaian Kinerja Tahun 2017

Upaya peningkatan pencapaian kinerja tahun ini merupakan hasil tindak lanjut terhadap revidi Laporan Kinerja sebelumnya sehingga capaian kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja tahun ini memberikan capaian kinerja yang bukan hanya berupa keluaran (*Output*) namun juga berupa capaian hasil (*Outcome*) serta manfaat (*Benefit*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Meskipun demikian, pencapaian kinerja Tahun 2017 ini tidak hanya mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang tepatnya penentuan target kinerja, kekurangan data dan informasi yang terkumpul, perbedaan teknik penghitungan data, serta faktor defisit anggaran yang sangat mempengaruhi terealisasinya kegiatan pendukung capaian program maupun capaian indikator. Tahun 2017 merupakan periode akhir dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017.

Berikut ini akan kami sajikan pencapaian sasaran Kota Lhokseumawe selama periode RPJMD Tahun 2012-2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Sasaran Periode RPJMD Kota Lhokseumawe
Tahun 2012-2017

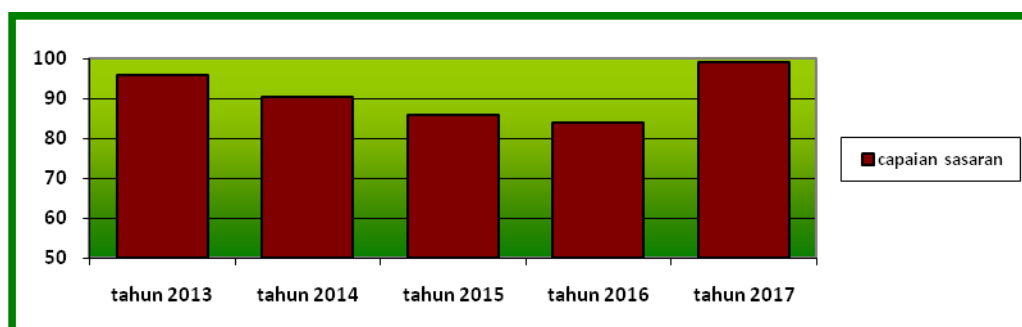
NO	SASARAN	Persentase Capaian Sasaran Peningkatan/ (Penurunan)				
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;	96%	90%	87%	73%	99%
2	Mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja;	97%	98%	89%	77%	80%
3	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;	50%	100%	77%	100%	100%
4	Mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami;	100%	0%	82%	78%	86%
5	Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat;	82%	132%	40%	87%	55%
6	Menurunnya angka kemiskinan;	93%	100%	67%	77%	86%
7	Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang berbasis komoditi unggulan;	43%	93%	69%	68%	90%

8	Meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata;	0%	0%	79%	64%	99%
9	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas;	93%	97%	89%	99%	97%
10	Menciptakan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga;	100%	100%	98%	100%	100%
11	Mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal;	81%	88%	75%	76%	94%
12	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;	87%	80%	90%	90%	92%
13	Meningkatkan kualitas infrastruktur Kota	100%	100%	84%	76%	100%
RATA-RATA PENCAPAIAN SASARAN		93%	81%	77%	85%	88%

Berdasarkan tabel 3.17 di atas, terlihat bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap sasaran strategisnya ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Capaian kinerja sasaran strategis terendah terjadi pada Tahun 2015 dengan persentase capaian 77%, selanjutnya paling tinggi di awal periode RPJMD yaitu Tahun 2013 dengan capaian 93%.

Pada Tahun 2017, capaian kinerja sasaran strategis Kota Lhokseumawe sebesar 88%. Persentase capaian kinerja tahun ini naik 3% dari tahun sebelumnya sebesar 85%. Kategori pencapaian strategis Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah sangat baik. Berikut akan disampaikan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis dengan perbandingan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2016.

1. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;



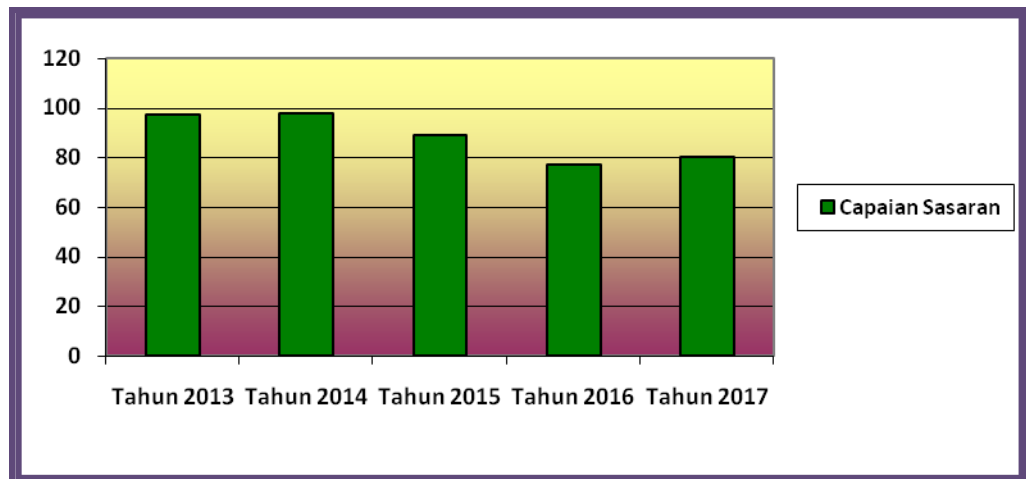
Pencapaian sasaran strategis ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2017, sasaran strategis ini naik sebesar 26% dari 73% menjadi 99% dengan kategori capaian sangat baik. Indikator pendukung sasaran strategis ini diperkuat pada capaian kinerja terhadap Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Penegakan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah.

Keberhasilan dalam meningkatkan capaian strategis ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung baik dari segi ketersediaan dana, kapasitas sumber daya aparatur, ketepatan penentuan target, serta factor pendukung lainnya. Berikut adalah analisis keberhasilan pencapaian atas sasaran Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum sebagai wujud implementasi UUPA;

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
1.1 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;	Melalui 4 jenis media yang ditetapkan sebagai target capaian kinerja, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kota Lhokseumawe tentang Peraturan Daerah/Qanun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai landasan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Publikasi tersebut terealisasi sebanyak 4 jenis media melalui pemasangan baliho, billboard, melalui spanduk serta penyebaran booklet dan leaflet yang berisikan produk hukum Pemerintah Kota Lhokseumawe.	melakukan perubahan capaian target kinerja berupa hasil (<i>outcome</i>), sehingga indikator kinerja ini dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1.2 Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah.	Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan penentuan target yang sudah mulai tepat sehingga capaian kinerjanya di tahun ini meningkat menjadi 99% di banding tahun lalu yang mencapai angka 94%. Faktor	Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, meningkatkan jadwal operasi penertiban dan penegakan Perda (Qanun) sehingga pada

	meningkatnya capaian indikator ini adalah ketepatan penentuan target kinerja dan membuktikan terjadinya penurunan jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Lhokseumawe dibandingkan tahun lalu sebanyak 298 kasus, Tahun 2017 menjadi 197 kasus.	tahun mendatang jumlah kasus dapat kembali diturunkan secara signifikan.
--	---	--

2. Mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja;



Pada sasaran ini, capaian sasaran yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun sebelumnya 77% menjadi 80%. Indikator pendukung sasaran strategis ini umumnya mengalami peningkatan, kecuali pada 1 (satu) indikator yang masih sangat kurang capaian kinerjanya.

Meskipun demikian, capaian kinerja sasaran strategis ini termasuk dalam kategori baik dan perlu ditingkatkan lagi pada tahun mendatang, sehingga target-target yang tidak tercapai dalam tahun ini bisa tercapai di tahun yang akan datang.

Sasaran strategis “mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme aparatur sebagai upaya peningkatan kinerja” ini, diperkuat oleh 10 (sepuluh) indikator pendukung sebagaimana analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
2.1 Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan;	Capaian kinerja sangat rendah dimana dari 455 jumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, hanya sebesar 104 orang pejabat yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan.	Menginventarisir data pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan baik tingkat IV maupun III untuk segera dikirimkan mengikuti Diklat Kepemimpinan yang sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme pejabat struktural.
2.2 Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian;	Capaian kinerja cukup baik meskipun realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin masih tergolong tinggi yaitu sejumlah 39 PNS/3.632 total PNS dibanding target sebesar 30 PNS/3.632 total PNS. Indikator ini merupakan bentuk pencapaian negatif dimana semakin tinggi realisasi maka semakin rendah pencapaian kinerjanya.	Melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Disiplin PNS, melakukan inspeksi secara rutin ke SKPD sebagai upaya edukasi serta mendorong semangat PNS untuk bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
2.3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah;	Penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan saldo utang belanja antara neraca <i>unaudited</i> data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reuiu Inspektorat.	Melakukan proses administrasi dengan lebih ketat melalui pencatatan setiap bentuk berkas maupun fisik, menyempurnakan regulasi tentang teknis penatausahaan keuangan, peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan, serta pengembangan aplikasi pendukung laporan keuangan.

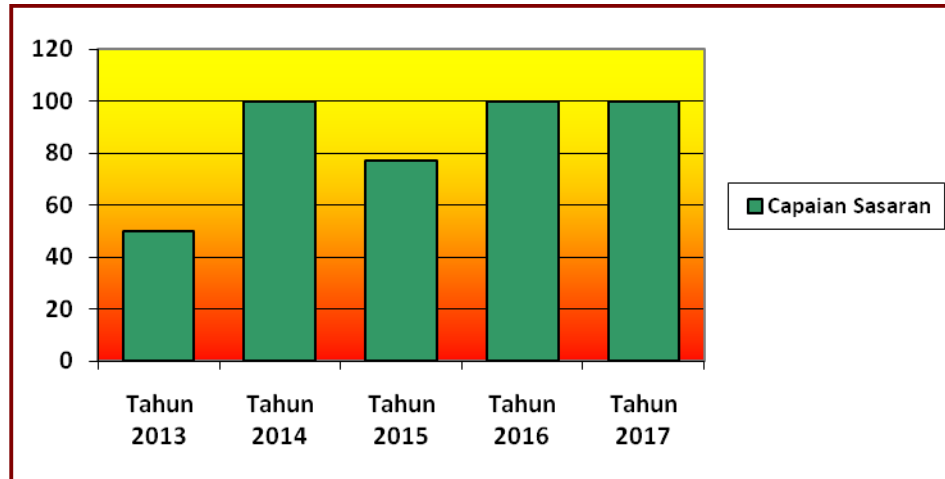
2.4	Kepemilikan KTP;	Capaian kinerja cukup baik dengan persentase capaian 80% dimana dari 136.193 jumlah penduduk wajib KTP, terdata sebanyak 108.735 penduduk yang sudah memiliki KTP. Hal tersebut menunjukkan masih sekitar 20% penduduk yang belum memahami pentingnya KTP.	Melakukan sosialisasi pentingnya KTP bagi masyarakat untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe, melakukan upaya penjemputan bola terhadap perekaman e-KTP ke desa-desa.
2.5	Lamanya proses perijinan;	Persentase capaian kinerjanya 100%, dimana dari target jumlah hari penyelesaian terhadap sebuah Surat Ijin diperkirakan 1 s/d 7 hari terlaksana tepat waktu bahkan ada pengurusan perijinan yang dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari kerja.	Mempertahankan kinerja pada tahun berikutnya.
2.6	Evaluasi penyelenggaraan SAKIP SKPD;	Dari 33 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebanyak 26 SKPD yang mendapatkan kategori baik dan cukup memuaskan.	Melakukan pendampingan, evaluasi serta reviu atas dokumen perencanaan serta dokumen pelaporan SKPD, memperkuat kinerja tim SAKIP melalui peningkatan kapasitas SDM nya.
2.7	Nilai Hasil evaluasi Laporan Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota (LPPD dan LKj IP);	<p>Nilai LPPD Tahun 2016 : 2,7639</p> <p>Peringkat ke 16 dalam Propinsi</p> <p>Nilai LKj IP Tahun 2016 : 51,72</p> <p>Kategori pencapaian : CC</p>	Melengkapi dokumen pendukung capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan terutama pada Renstra/RPJMD dan Renja/RKT SKPD

2.8	Keterbukaan informasi public melalui website;	Situs wesite resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah: www.lhokseumawekota.go.id	Melakukan updating data setiap harinya sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.9	Tingkat keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD;	Pada Tahun 2017 jumlah program yang tertampung dalam RKPD Tahun 2017 adalah sebanyak 175 program dari 202 program yang terdapat dalam dokumen RPJMD.	Melakukan sinkronisasi program-program yang terdapat dalam dokumen RKPD agar sesuai dengan dokumen RPJMD
2.10	Persentase penanganan bencana.	Sebanyak 17 laporan kebencanaan yang masuk dan semuanya berhasil ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan prosedur.	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang tertimpa musibah/bencana.

Pada Tahun 2017 capaian kinerja yang paling kecil adalah pada indikator Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan. Dari 455 jumlah jabatan structural yang ada dalam pemerintahan Kota Lhokseumawe, hanya sebesar 104 saja yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan. Hal tersebut mengartikan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe harus dapat memenuhi kewajiban mengikutsertakan pejabat yang duduk di jabatan strukturalnya untuk segera mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan eselonering agar tercapainya pejabat yang professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lebih terarah guna mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;

Pada sasaran strategis ini, terdapat 3 (tiga) indikator yang memperkuat pencapaian kerjanya.



Pencapaian kinerja untuk sasaran masih dapat dipertahankan dengan sangat baik, dimana capaian tahun sebelumnya dengan persentase 100% masih dapat diraih tahun ini sebesar 100%. Ketiga indikator yang memperkuat sasaran ini rata-rata mencapai angka 100% dengan analisis keberhasilannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
3.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya;	Pada Tahun 2017 diselenggarakan sebanyak 1 kali festival seni yaitu festival Rapa'l Uroeh se-Kota Lhokseumawe sekaligus merupakan launching icon seni budaya Kota Lhokseumawe. Melalui festival ini, minat kunjungan wisata turut meningkat ke Kota Lhokseumawe.	Menyelenggarakan even/festival kesenian daerah yang menjadi ciri khas Kota Lhokseumawe sehingga dapat meningkatkan PAD melalui kontribusi sektor pariwisata.

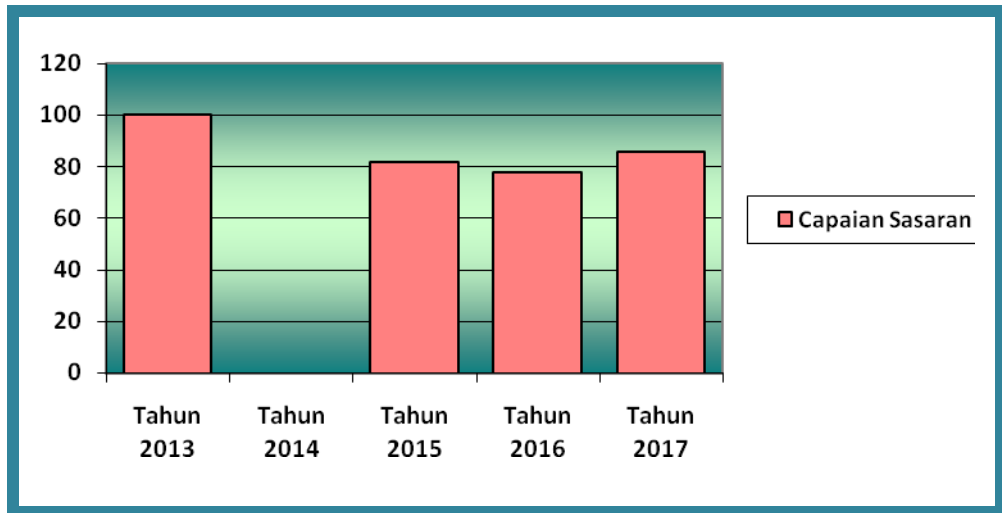
3.2	Pelestarian karya seni dan budaya warisan sebagai nilai sejarah;	Tahun 2017, situs sejarah yang dilestarikan dan diupayakan menjadi objek wisata Kota Lhokseumawe adalah Goa Jepang.	Melakukan revitalisasi terhadap situs-situs sejarah di Kota Lhokseumawe agar tidak musnah serta menjadi bukti sejarah bagi generasi di masa mendatang.
3.3	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif.	Jumlah kelompok seni yang dibina oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sebanyak 1 kelompok yaitu Sanggar Pocut Meurah Inseun yang telah meraih prestasi di berbagai even daerah maupun nasional. Sanggar ini juga kerap ditampilkan dalam acara sambutan tamu-tamu dari luar daerah yang berkunjung ke wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai bentuk penyambutan “peumulia jamee” yang merupakan cirri khas suku Aceh pada umumnya.	Mengembangkan prestasi sanggar yang dibina oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan dimanfaatkan sebagai bentuk promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.

Pada Tahun 2017, ketiga indikator pendukung pencapaian sasaran ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya dan situs sejarah yang terdapat di wilayah Pemerintah kota Lhokseumawe. Selain itu upaya tersebut juga sebagai peluang dan potensi untuk promosi kunjungan wisata ke wilayah Kota Lhokseumawe yang berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat serta bagi pemasukan PAD Kota Lhokseumawe.

4. Mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan memiliki karakter islami;

Pada sasaran ini, nilai capaiannya mengalami peningkatan sebanyak 6%. Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebesar 86% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai persentase 78%. Terdapat 5 (lima) indikator pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran ini.

Peningkatan capaian kinerja sasaran ini merupakan upaya dari Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan berkarakter islami. Mengingat hal tersebut merupakan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan penerapan syariat islam dalam kehidupan sehari-harinya.



Capaian kinerja sasaran ini juga membuktikan bahwa dalam lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, suasana dan karakter islami masyarakatnya masih tetap terjaga dengan baik.

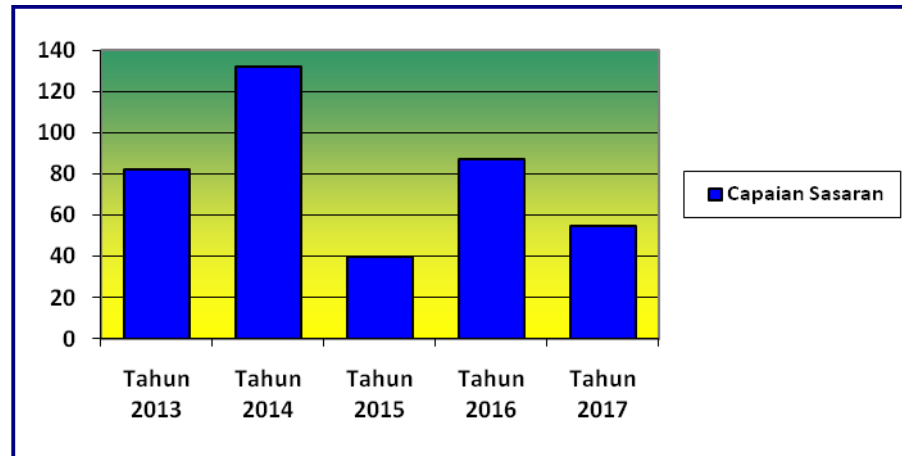
INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
4.1 Rasio Ketersediaan Dayah dan Santri;	Jumlah Santri di Kota Lhokseumawe sebanyak 9.676 orang dibandingkan jumlah Dayah sebanyak 56 unit. Capaian kinerjanya 87% dimana target yang diharapkan adalah 1 dayah dapat menampung 150 santri.	Mengembangkan jumlah dayah yang sudah ada sehingga rasio dayah terhadap santri dapat menjadi 1 dayah bagi 200 santri.
4.2 Rasio Ketersediaan Tengku/Guru dana Santri;	Persentase capaian 89% dengan rasio 572 orang Tengku/guru terhadap 9.676 orang santri. Target yang diinginkan adalah 1 orang Tengku/Guru mengajar 15 orang santri.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Tengku/Guru sehingga rasio dapat menjadi 1 orang tengku/guru terhadap 20 orang santri.

4.3	Rasio Ketersediaan Balai Pengajiandi gampong;	Jumlah Gampong di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 68 gampong dengan rata-rata jumlah balai pengajian 4 sampai 6 unit pada setiap dusunnya. Rasio ketersediaan balai Pengajian Tahun 2017 adalah 686 unit terhadap 35.273 santri pengajian. Berbeda dengan dayah, balai pengajian ini merupakan balai gampong yang digunakan penduduk mulai usia 4-17 tahun yang mengikuti pengajian rutin di gampong.	Meningkatkan kegiatan Saweu Gampong yang selama ini terlaksana dengan baik sehingga dapat mengakomodir aspirasi masyarakat terutama dalam hal peningkatan nilai syariat islam di wilayah gampong.
4.4	Pembinaan Hafidz dan Hafidzah Kota Lhokseumawe;	Dari 59 peserta yang diikutsertakan dalam Perlombaan MTQ Tingkat Propinsi hanya 49 orang yang lulus seleksi dengan capaian kinerja 88%	Pembinaan terhadap Hafidz dan Hafidzah Kota Lhokseumawe sebagai bentuk motivasi dan menumbuhkan semangat menghafal serta melestarikan budaya hafal Al Quran di masyarakat.
4.5	Peningkatan Penerimaan Zakat.	Persentase capaian 87% dengan target capaian 7 milyar terealisasi sebesar 6 miliar lebih.	Sosialisasi serta himbauan yang kerap disampaikan kepada masyarakat untuk membayar zakat yang dapat membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah

5. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

Pencapaian sasaran strategis ini merupakan yang paling rendah dari sasaran strategis lainnya. Didukung sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, sasaran ini belum mampu mencapai kategori yang memuaskan sehingga hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan capaian kinerjanya di masa mendatang.

Perbandingan capaian kinerja indikator dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Persentase capaian kinerja indikator pada sasaran ini mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, indikator yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran ini juga berbeda dari segi jumlahnya. Pada Tahun 2016 indikator yang digunakan sebanyak 2 (dua) indikator dan tahun ini didukung sebanyak 4 (empat) indikator sebagaimana tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
5.1 Pertumbuhan PDRB: Migas dan, Non Migas;	Sejak operasional PT.ARUN NGL resmi ditutup, kontribusi PDRB terhadap migas maupun Non Migas di Kota Lhokseumawe turun drastis capaiannya. Hal tersebut berdampak pada rendahnya realisasi atas capaian target yang telah ditetapkan.	Mendukung pengembangan sektor industri kreatif yang dapat memberikan kontribusi baru atas peningkatan perekonomian masyarakat Kota Lhokseumawe
5.2 Persentase Koperasi Aktif;	Persentase koperasi aktif 32%. Pada Tahun 2017 hanya 83 Koperasi dari 257 jumlah koperasi yang menyampaikan Laporan RAT nya.	Melakukan koordinasi di tingkat Kecamatan untuk membubarkan koperasi yang tidak menyampaikan laporan RAT nya

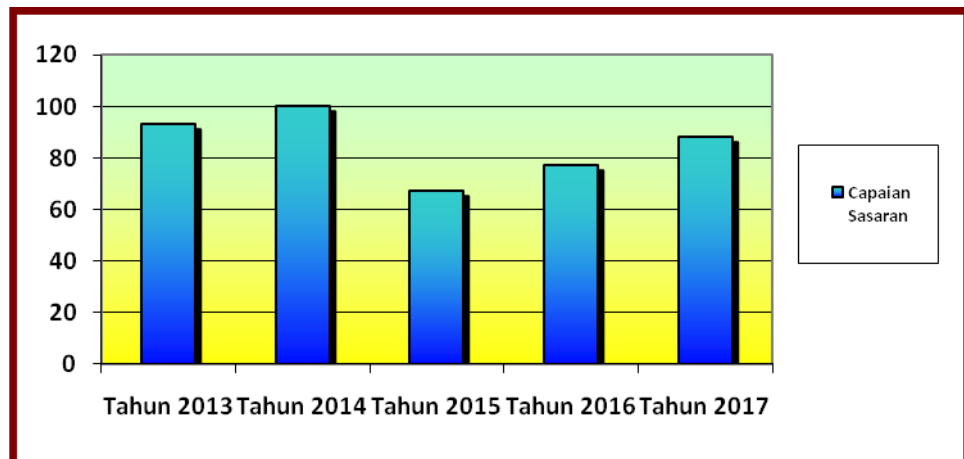
5.3	Jumlah usaha mikro dan kecil;	Meningkat pesat pada Tahun 2017 dimana realisasi melebihi target yang ditetapkan. Dari 1895 unit UMKM yang ditargetkan, tercapai sebanyak 2840 atau lebih 945 unit dari target. Capaian kinerja ini adalah 150%.	Mendorong pihak Perbankan untuk memberikan keringanan dan kemudahan pinjaman bagi UMKM, Menyusun regulasi yang memudahkan UMKM dalam proses perizinan dan pengembangan usaha.
5.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.	Sebanyak 8 dari 68 kelompok PKK yang difokuskan untuk pengembangan produksi dan produktivitasnya guna mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.	Memberikan pelatihan dan peningkatan ketrampilan kepada kelompok PKK, memberikan support dan bimbingan kepada kelompok PKK.

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menggambarkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh pada suatu daerah. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, aktivitas ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan peningkatan pula pada nilai PDRB secara kontinu dari tahun ke tahun.

Rendahnya capaian sasaran untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat ini dipengaruhi oleh rendahnya capaian atas indikator kontribusi PDRB. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan rencana awal masa periode RPJMD. Dengan ditutupnya operasional PT. ARUN NGL justru kontribusi PDRB semakin turun drastic dan perekonomian masyarakat menjadi lesu dan rendah.

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengambil langkah dengan memberikan dukungan kepada Koperasi dan UMKM sebagai upaya peningkatan perekonomian. Pemerintah mendorong pihak Perbankan agar memudahkan dan meringankan pinjaman bagi UMKM serta memperkuat regulasi perizinan yang memudahkan UMKM.

6. Menurunnya angka kemiskinan;



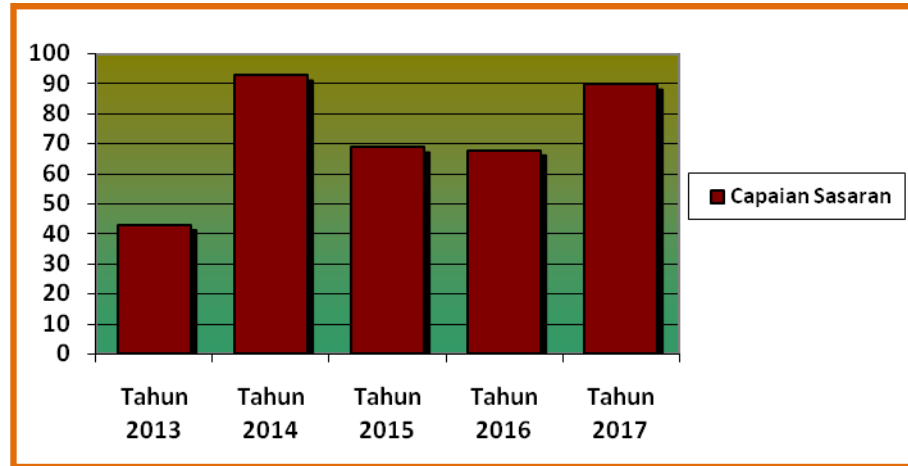
Sasaran ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11% menjadi 88%. Meskipun capaian kinerja tersebut dikategorikan sangat baik namun terdapat pula indikator kinerja yang masih cukup pencapaiannya dan perlu ditingkatkan.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe;	Menempati urutan kedua setelah ibukota Propinsi dengan angka 75,78. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kota Lhokseumawe sudah cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi Aceh.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui program pelayanan rujukan masyarakat miskin, meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM
6.2 Kelancaran Penyaluran Raskin;	Capaian kinerja 100% dengan target 7200 RTS/KK, terealisasi sebanyak 7.164 RTS/KK.	Penyaluran Raskin bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan program pro-rakyat oleh Walikota

6.3	Tingkat Pengangguran Terbuka;	Tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi di wilayah Kota Lhokseumawe. Dari 110.659 penduduk usia kerja, sebanyak 8.141 penduduk yang tidak bekerja. Menempati posisi kedua tertinggi di Propinsi Aceh.	Mengupayakan gedung BLKI sebagai tempat workshop pencari kerja, membuat pelatihan peningkatan skill (ketrampilan) sebagai persiapan SDM terkait proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
6.4	Rasio penduduk yang bekerja (persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan);	Capaian kinerja 67% dimana dari 110.659 penduduk usia angkatan kerja, sebesar 68.367 penduduk yang sudah bekerja. Rendahnya capaian disebabkan target yang terlalu besar.	Menyiapkan SDM calon tenaga kerja untuk perekrutan sehubungan dengan dibukanya KEK Arun melalui pelatihan khususnya bidang perbengkelan.
6.5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja;	Capaian kinerja sudah cukup baik dimana dari 198.088 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe, sebesar 145.273 penduduk yang telah bekerja.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat gampong.
6.6	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani.	Capaian kinerja sangat baik yaitu terlayani nya kebutuhan PMKS sesuai dengan target Pemerintah Kota Lhokseumawe.	Penyaluran dana jadup (Jatah Hidup) bagi masyarakat usia 70 tahun ke atas.

Pada Tahun 2017, rata-rata indikator kinerja pendukung menunjukkan peningkatan sehingga mempengaruhi persentase pencapaian sasaran strategis ini. Capaian kinerja terendah adalah rasio penduduk yang bekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe masih tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkapabilitas agar nantinya dapat direkrut menjadi calon tenaga kerja sehubungan dengan dibukanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Kota Lhokseumawe yang mengutamakan putra/putri daerah.

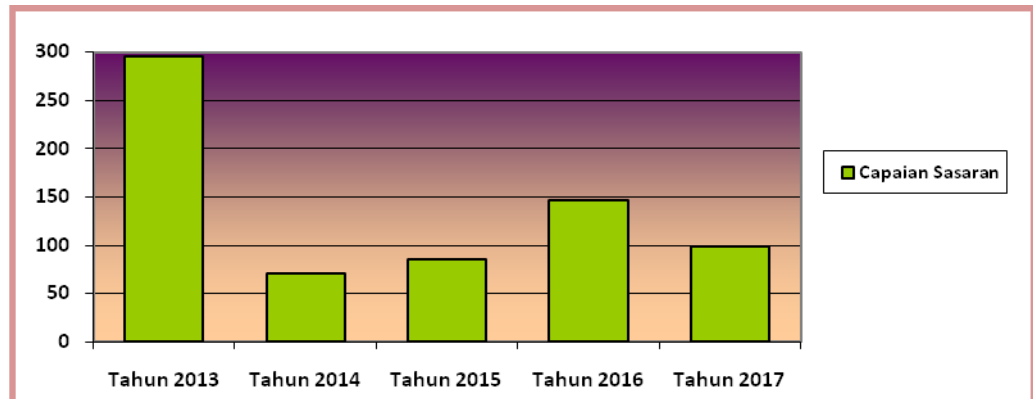
7. Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perikanan dan peternakan yang berbasis komoditi unggulan;



Pada Tahun 2017, sasaran ini mengalami peningkatan yang sangat baik dari 68% menjadi 90% dengan 3 (tiga) indikator pendukung. Umumnya ketiga indikator tersebut berhasil dalam capaian kinerjanya dan perlu ditingkat serta lebih memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
7.1 Persentase penanggulangan penyakit ternak;	Kebhasilan dalam pengendalian mutu dan meningkatkan produksi hewan ternak.	Vaksinasi terhadap 585 hewan ternak dari 650 hewan ternak yyang terdata.
7.2 Pengembangan budidaya perikanan;	Capaian kinerja 100% yang menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam menerapkan pilot project budi daya udang windu untuk memenuhi komoditi unggulan Pemerintah Kota Lhokseumawe.	Menyiapkan anggaran pengembangan budidaya udang windu sebesar 149.871.00 rupiah.
7.3 Cakupan binaan kelompok nelayan.	Terjalinnya kerjasama antara Kelompok Tani/Nelayan Andalan dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan baik.	Penyaluran bantuan operasional kepada 4 dari 5 kelompok nelayan di Kota Lhokseumawe.

8. Meningkatkan PAD daerah melalui sektor pariwisata;



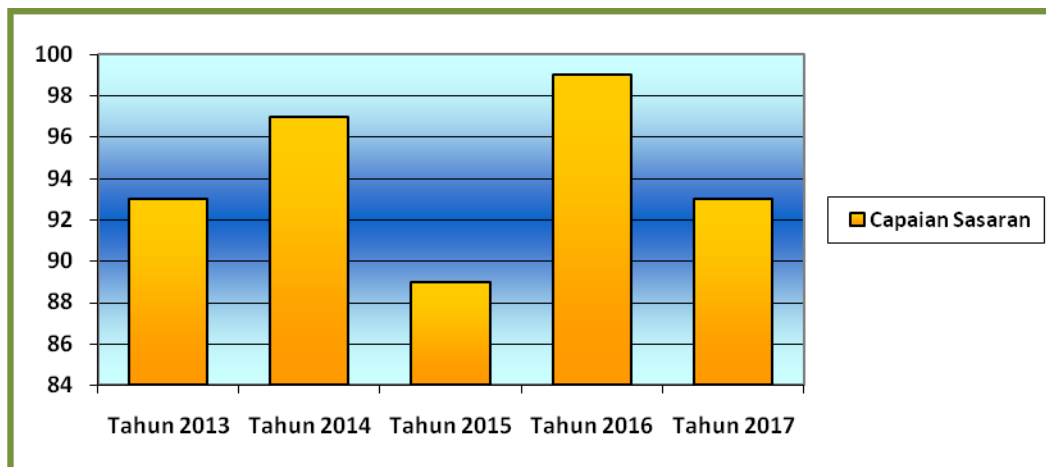
Capaian kinerja indikator pada sasaran ini cukup baik mencapai angka 99% dengan 2 (dua) indikator pendukung. Upaya meningkatkan PAD Kota Lhokseumawe dilakukan dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dimana Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 mengadakan even yang sangat unik yaitu “Gampong Expo” yang menampilkan hasil kreasi dari setiap gampong di Kota Lhokseumawe serta festival seni Rapa’l Uroeh.

Pengembangan objek wisata Taman Goa Jepang serta waduk Jeulikat yang menjadi daya tarik wisata sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kota Lhokseumawe.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
8.1 Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah Tahun 2017;	Realisasi capaian kinerja yang mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 97%.	Penguatan regulasi tentang pajak dan retribusi.
8.2 Kunjungan wisata;	Keberhasilan pencapaian target kinerja sebanyak 229.095 jumlah kunjungan wistaa ke Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017	Pengembangan objek wisata situs sejarah gua jepang, waduk jeulikat, Islamic centre sebagai bentuk wisata religi.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sektor pariwisatanya. Pemeliharaan situs sejarah seperti Goa Jepang yang tahun ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan dan pembukaan objek wisata Waduk Jeulikat yang juga mengundang antusiasme warga maupun wisatawan untuk berkunjung terlihat dalam capaian kinerja pada indikator kunjungan wisata.

9. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas;

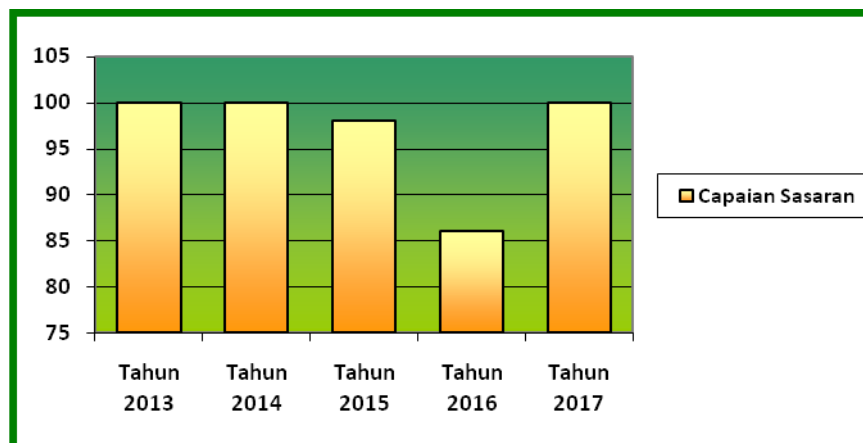


Pencapaian kinerja sasaran ini menurun sebesar 6% menjadi 93% dari tahun sebelumnya sebesar 99%. Pencapaian kinerja yang sangat baik di tahun ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dalam membina dan memotivasi masyarakatnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan kelak dapat menjawab tantangan global akan kebutuhan ketenagakerjaan yang berkualitas pula.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
9.1 Persentase Penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf;	Keberhasilan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menurunkan angka buta huruf.	Operasional mobil perpustakaan keliling untuk membangkitkan minat baca masyarakat Kota Lhokseumawe

9.2	Angka Partisipasi Murni (APM);	Rata-rata capaian 94% dengan tingkat APM SD/MI/Paket A sebesar 87%, tingkat SMP/MTS/Paket B sebesar 101%, dan tingkat SMA/MA/Paket C sebesar 95%	Pembangunan sekolah baru, biaya pendidikan sekolah gratis, peningkatan fasilitas perlengkapan sekolah, pelatihan terhadap tenaga pengajar.
9.3	Angka Kelulusan;	Rata-rata capaian kinerja sebesar 99% pada tiap tingkatan pendidikan.	Himbauan kepada sekolah untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional yang berbasis komputer.
9.4	Persentase guru berpendidikan S1/D4.	Sebanyak 3.761 guru yang telah menyelesaikan pendidikan S1/D4 dari 4.280 total jumlah guru di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.	Dukungan terhadap peningkatan kompetensi guru sehingga memenuhi standar profesionalisme.

10. Menciptakan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga;



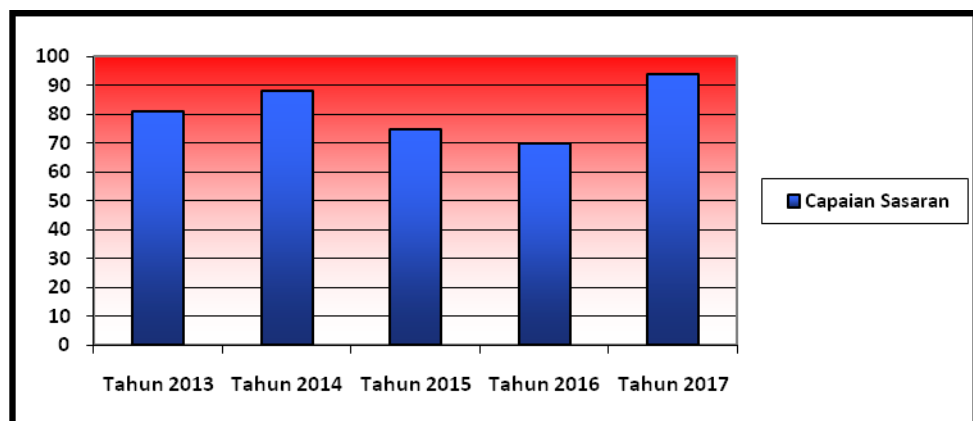
Setelah sempat turun capaiannya tahun 2016 ini, sasaran menciptakan SDM pada bidang Pemuda dan Olahraga kembali mengalami peningkatan menjadi 100% dengan kategori capaian sangat baik.

Persentase capaian kinerja sasaran ini didukung oleh indikator kinerja jumlah kelompok pemuda yang dibina serta jumlah kelompok olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
10.1 Pembinaan terhadap organisasi pemuda;	Pembinaan terhadap 68 kelompok pemuda di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Dukungan terhadap kegiatan kelompok pemuda Kota Lhokseumawe
10.2 Pembinaan terhadap organisasi olahraga.	Pembinaan terhadap 159 kelompok olahraga di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Mengadakan turnamen olahraga seperti Sepakbola memperebutkan Walikota Cup II, mengirimkan atlet ke Pra Pora 2017

Dukungan pemerintah terhadap kelompok pemuda dan olahraga merupakan upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menciptakan SDM yang berkualitas sehingga menjadi generasi unggul dalam membangun Kota Lhokseumawe di masa mendatang. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengirimkan atletnya untuk mengikuti even Pra Pora bahkan Walikota turut mengunjungi ke kamp atlet asal Kota Lhokseumawe sebagai bentuk dukungan, memberi semangat dan motivasi bagi para atlet.

11. Mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan optimal;;



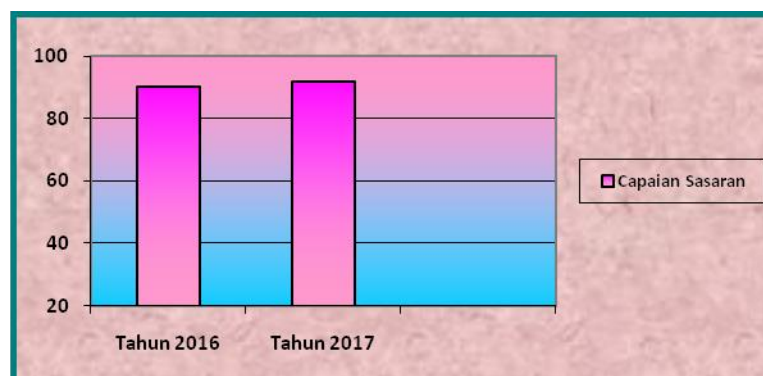
Pencapaian sasaran ini di Tahun 2017 adalah 94% dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 70%. Capaian kinerja terhadap sasaran ini didukung oleh 8 (delapan) indikator kinerja rata-rata realisasinya mendekati dan ada pula yang terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA		ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
11.1	Rasio puskesmas per satuan penduduk;	6 unit puskesmas terhadap 198.088 jumlah penduduk yang tersebar pada 4 kecamatan.	Peningkatan mutu dan kualitas Puskesmas sebagai Pusat pelayanan kesehatan masyarakat.
11.2	Cakupan Kunjungan Bayi;	88% jumlah kunjungan bayi yang dilayani atau 3.800 dari 4.322 jumlah bayi di Kota Lhokseumawe.	Meningkatkan pelayanan posyandu dan pemenuhan pemberian imunisasi dasar bayi.
11.3	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan;	Sebanyak 5 kasus gizi buruk yang dilaporkan berhasil ditangani dengan baik. Capaian kinerja 100%	Pengawasan dan pemantauan oleh Dinas Kesehatan, Pemberian imunisasi dan asupan makanan tambahan bagi penderita gizi buruk.
11.4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru	Sebanyak 88 kasus TB berhasil ditangani sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%	Menekan kasus penyebaran TB setiap tahun melalui penanganan langsung terhadap pasien suspect TB
11.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;	Penurunan jumlah kasus dari tahun sebelumnya yang mencapai angka ratusan menjadi 95 kasus di Tahun 2017.	Melakukan fogging ke pemukiman warga masyarakat, himbuan rutin kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,serta sosialisasi bahaya DBD

11.6	Angka kelangsungan hidup bayi;	Capaian kinerja yang sangat baik dari 4.322 jumlah bayi yang lahir, sebanyak 17 bayi yang menagalami kematian.	Mengaktifkan posyandu sebagai sarana kesehatan pemeriksaan ibu hamil, meningkatkan kompetensi bidan untuk pertolongan persalinan.
11.7	Angka usia harapan hidup;	Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe tergolong tinggi dengan usia 71.05 tahun.	Perbaikan status kesehatan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
11.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi.	Pertolongan persalinan terhadap 4.265 jumlah ibu bersalin dari 4.635 jumlah ibu hamil di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.	Optimalisasi fungsi puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe, peningkatan kompetensi bidan di puskesmas.

12. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

Pertolongan pertama pada korban kekerasan, terutama pada anak maupun perempuan tidak selamanya harus menjadi kewajiban pihak berwajib. Orang-orang sekitar juga dapat membantu korban kekerasan, dengan menjadi pendengar dan pemberi perlindungan yang baik serta dapat bekerja sama membantu korban terlepas dari tindak kekerasan, sebelum pada akhirnya membantu mereka pada para profesional yang dapat membantu menangani kasus mereka.



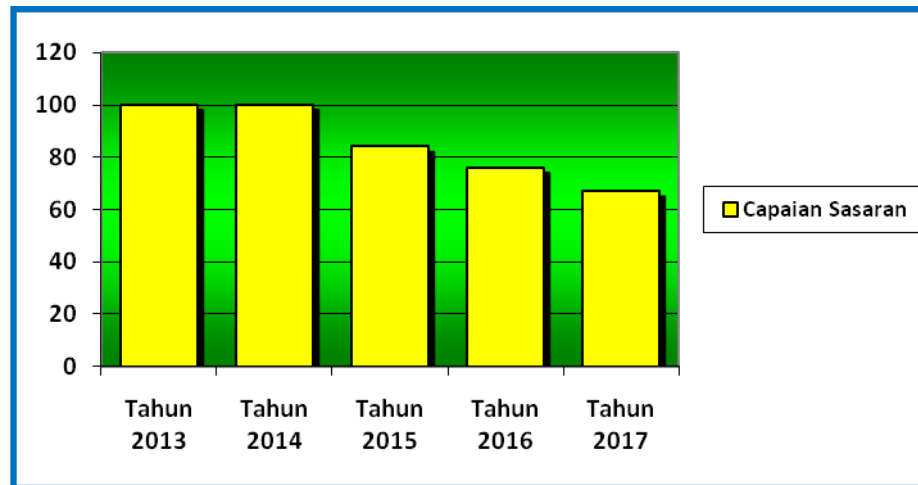
Pada Tahun 2017, tercatat sebanyak 8 kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pendampingan terhadap korban KDRT dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Untuk memperkuat capaian sasaran ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe menetapkan 4 (empat) indikator pendukung dengan rata-rata capaian 94%.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
12.1 Cakupan peserta KB aktif;	Keberhasilan program KB salah satunya diukur melalui persentase peserta KB aktif.	Pelayanan KB terhadap 24.870 peserta KB aktif terhadap 29.998 Pasangan Usia Subur.
12.2 Rasio KDRT;	Sebanyak 8 kasus yang dilaporkan berhasil ditangani dengan baik.	Pendampingan oleh P2TP2A
12.3 Pembinaan forum komunikasi anak;	Pembinaan terhadap 581 anak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Anak Lhokseumawe oleh Dinas P3A,P2 &KB Kota Lhokseumawe.	Memfasilitasi kegiatan forum anak Kota Lhokseumawe, persiapan menuju “Kota Layak Anak”
12.4 Indeks Pembangunan Gender.	IPG Kota Lhokseumawe masih cukup tinggi dan mengidentifikasi besarnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.	Menetapkan program responsif gender, menurunkan angka KDRT, bantuan terhadap perempuan dalam pengembangan usaha Rumah Tangga.

13. Meningkatkan kualitas infrastruktur Kota;

Pada Tahun 2017, capaian kinerja sasaran ini hanya mencapai angka 67% dengan kategori cukup. Terjadinya penurunan capaian kinerja ini disebabkan tidak terpenuhinya target-target indikator kinerja pendukung sasaran ini.



Menurunnya capaian indikator kinerja ini disebabkan besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selain itu, terjadinya deficit anggaran yang cukup besar, mengharuskan penghentian program-program fisik sementara waktu dan mengutamakan program prioritas lainnya.

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA	ALTERNATIF SOLUSI
13.1 Penurunan persentase kawasan pemukiman kumuh;	Luas pemukiman kumuh yang berhasil ditanagni seluas 45,95 hektar dari jumlah total wilayah kumuh Kota Lhokseumawe seluas 166,79 hektar.	Pembangunan infrastruktur wilayah Kumuh pesisir pantai menjadi lokasi wisata
13.2 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik;	Dari 412.468 km total panjang jalan Kota Lhokseumawe yang berkondisi baik hanya sepanjang 147.668 km atau sekitar 35%.	Rehabilitasi jalan utama yang umumnya rusak karena tergenang air, Pembangunan jalan lingkar Kota Lhokseumawe
13.3 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih;	60,54% penduduk sudah menggunakan air bersih atau sebanyak 32.480 RT dari 53.651 total RT .	Pembangunan PDAM Ie Beusaree Rata yang saat ini sudah mengalir air bersih di Kecamatan Muara Satu
13.4 Persentase penanganan sampah;	Penanganan sampah sebanyak 94.895 m ³ dari total jumlah sampah sebanyak 114.875 m ³ atau sekitar 82,61%	Tersedianya TPA seluas 12 hektar yang diperkirakan dapat menampung sampah sampai 15 tahun ke depan.

13.5	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Capaian kinerja sebesar 51% dimana dari luas wilayah ber HPL/HGB seluas 3.671 m ² , RTH Kota Lhokseumawe hanya seluas 25,4 m ² atau sebesar 0,69%.	Revitalisasi Taman Riyadhah yang terdapat di pusat Kota Lhokseumawe.
13.6	Peningkatan jumlah Bangunan yang ber-IMB	Capaian kinerja 125%. Melebihi target yang ditetapkan sebesar 100 unit bangunan yang ber-IMB, terealisasi sebesar 125 unit.	Penerapan program pemutihan IMB, penguatan regulasi tentang IMB.

3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2017 DENGAN STANDAR NASIONAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat dipedomani dan menjadi rujukan pelayanan wajib yang dilaksanakan sampai lingkup Pemerintah Daerah. Laporan SPM Pemerintah Daerah wajib disampaikan per semester ke Propinsi serta Kementerian setiap tahunnya. Adapun yang menjadi ruang lingkup SPM Pemerintah mencakup 6 bidang yaitu:

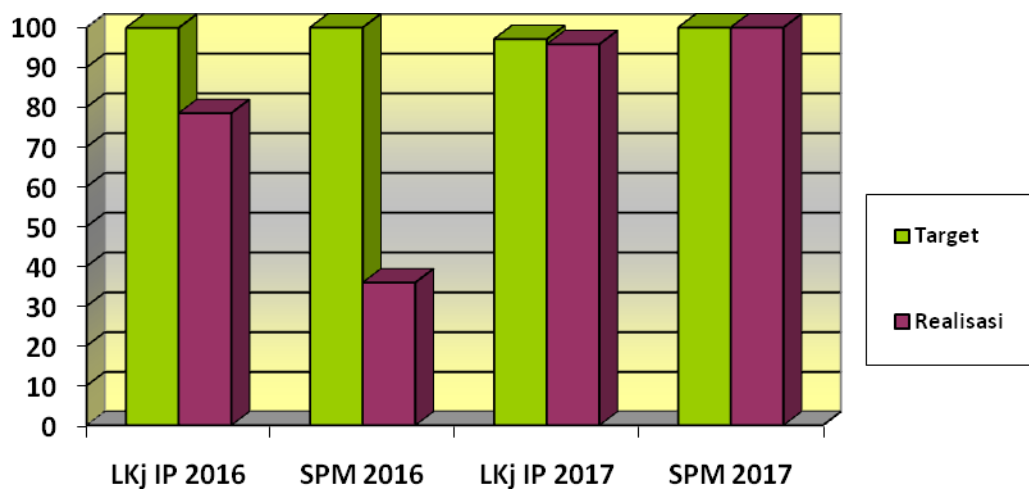
- 1) SPM Bidang Kesehatan ;
- 2) SPM Bidang Sosial ;
- 3) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) SPM Bidang Perumahan Rakyat ;
- 5) SPM Bidang Pendidikan Dasar;
- 6) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pencapaian target SPM (standar nasional) diperlukan sebagai bentuk perbandingan antara capaian kinerja atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan capaian target atas indikator SPM. Berikut akan disampaikan analisis perbandingan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan capaian kinerja SPM Kota Lhokseumawe:

BIDANG KESEHATAN

Untuk perbandingan capaian indikator di bidang kesehatan Tahun 2017 dan standar nasional (Standar Pelayanan Minimum) dapat dilihat pada grafik berikut:

a. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi;

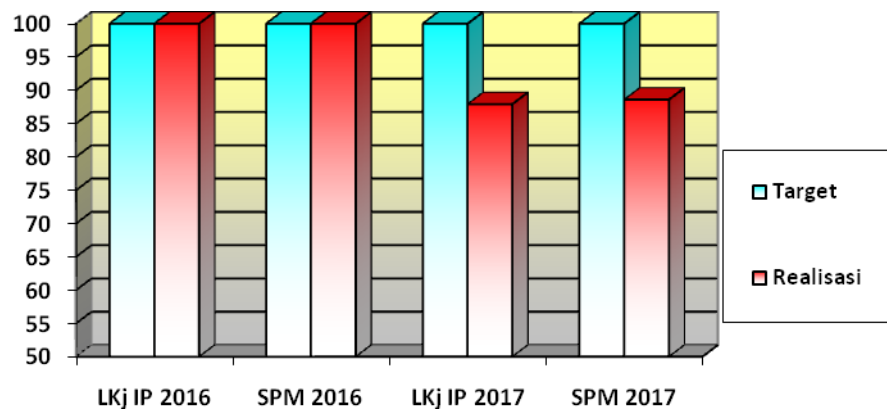


Capaian kinerja SPM dengan Lkj IP pada Tahun 2017 adalah 100% dan 92%. Perbedaan yang terlihat adalah pada target yang ditetapkan oleh masing-masing dokumen laporan. Untuk Lkj IP, target yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kota Lhokseumawe adalah sebesar 97,09%, sementara pada laporan SPM target yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari terdatanya jumlah ibu Hamil pada pusat pelayanan kesehatan. Data yang diperoleh menyebutkan bahwa dari 4.738 sasaran ibu hamil, sebanyak 4.537 orang ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan. Terjadinya gab antara target dan dengan realisasi sebesar 4,2% atau sebanyak 201 org ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan kehamilan. Penyebab terjadinya gab ini dikarenakan cakupan ibu hamil yang didata adalah ibu hamil sesuai standar kualitas pada trimester, ibu hamill dengan kunjungan kehamilan minimal 4 kali, dan ibu hamil dengan usia kehamilan >24 minggu.

Berdasarkan data tersebut, ditentukan kemudian jumlah ibu hamil yang mendapatkan pertolongan persalinan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 4.265 ibu bersalin, semuanya berhasil diberikan pelayanan dengan baik sehingga capaiannya adalah 100%.

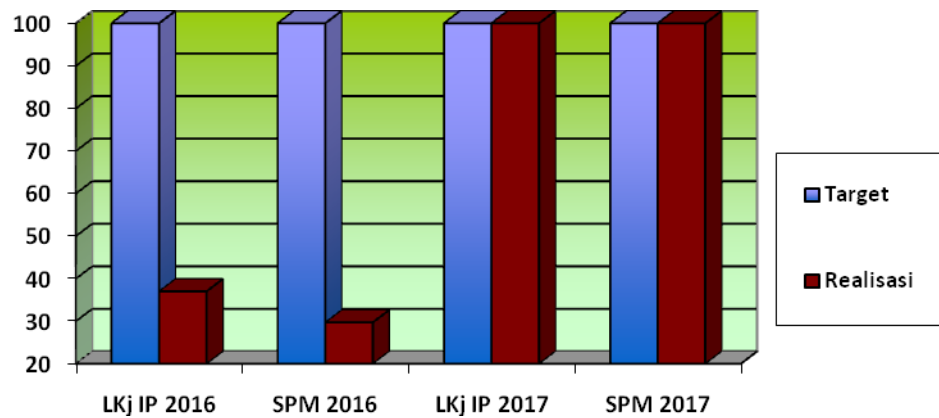
b. Cakupan Kunjungan Bayi;



Target capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk indikator cakupan kunjungan bayi pada Tahun 2017 adalah sebesar 100% dan capaian target SPM 2017 di semester II sebesar 100%.

Realisasi pada LKj IP Tahun 2017 mencapai 87.92%, sementara untuk laporan SPM mencapai angka 88,6%. Perbedaan capaian kinerja ini terjadi dikarenakan rumusan pengukuran kinerja yang berbeda. Untuk LKj IP, cakupan kunjungan bayi diperoleh berdasarkan jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap jumlah bayi seluruhnya di Kota Lhokseumawe. Sedangkan untuk laporan SPM yang diperbaharui indikatornya melalui Permenkes RI, penghitungan jumlah kunjungan balita menjadi indikatornya. Sehingga diperoleh capaian yang lebih besar daripada LKj IP 2017 dimana dari 21.536 jumlah balita, sebanyak 19.087 balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita. Terjadinya gap antara target dan realisasi disebabkan masih ada balita dengan usia kurang dari 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Hal tersebut dikarenakan penghitungan SPM menggunakan angka usia balita tersebut. Selain itu masih terdapat sejumlah bayi yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi.

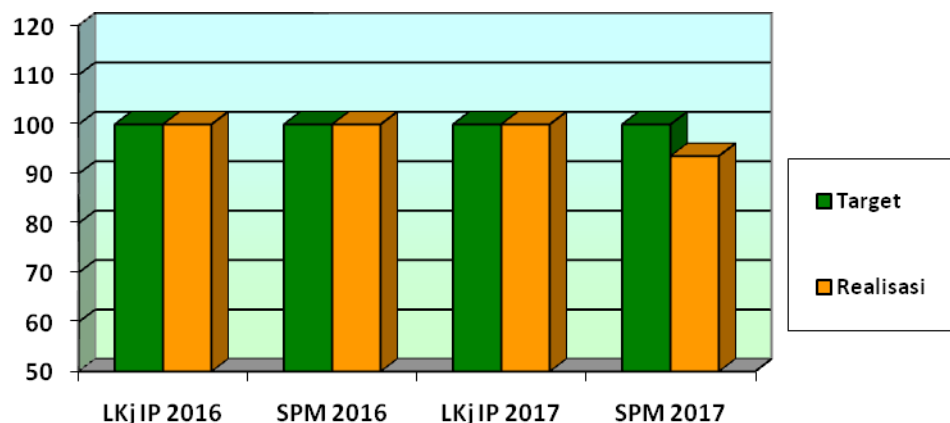
c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB baru;



Pada Tahun 2016 realisasi terlihat sangat rendah dari target yang ditetapkan. Selain dikarenakan laporan SPM yg masuk adalah laporan semester I, target yang ditetapkan pada RPJMD juga terlalu besar.

Untuk Tahun 2017, capaian kinerja sudah terlihat sangat baik dimana kedua indikator capaian memperoleh persentase 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 88 kasus TB yang dilaporkan, semuanya dapat ditangani dengan baik.

d. Angka kelangsungan hidup bayi

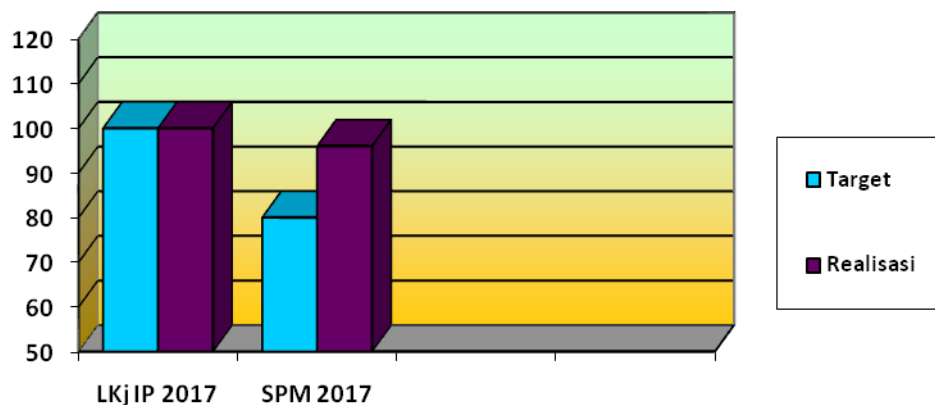


Pencapaian kinerja indikator ini mengalami sedikit penurunan pada laporan SPM dimana dari target yang ditetapkan 100%, terealisasi sebesar 93,6%. Perbedaan capaian kinerja ini disebabkan perbedaan pengukuran antara LKj IP Tahun 2017 dengan SPM 2017 yang sudah menerapkan standar sesuai dengan SPM baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Terjadinya penurunan capaian SPM dikarenakan masih adanya bayi baru lahir yang tidak diimunisasi (tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar), inisiasi menyusui dini tidak tercapai terutama pada persalinan dengan komplikasi, serta kematian bayi baru lahir dan kematian bayi dalam kandungan.

BIDANG SOSIAL

a. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terlayani



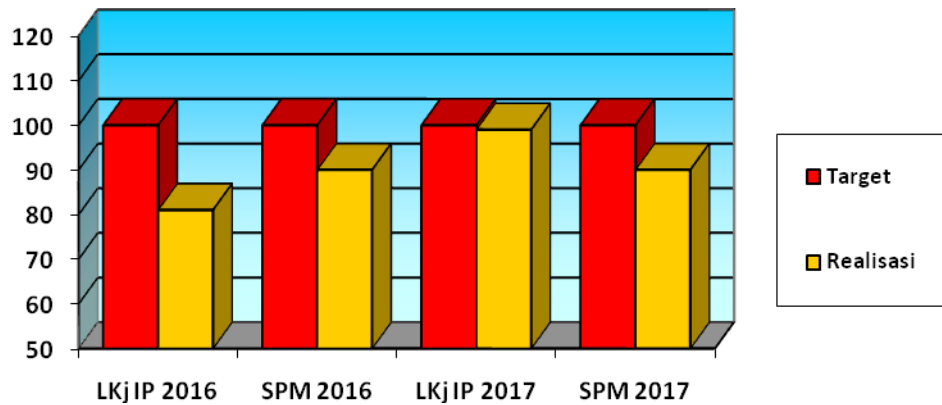
Persentase capaian kinerja pada LKj IP Tahun 2017 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan. Sementara untuk laporan SPM Tahun 2017 capaian kinerja adalah sebesar 96% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Dari 800 jumlah PMKS yang terdata pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, sebanyak 765 PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Cakupan Penegakan dan penertiban pelanggaran Peraturan Daerah;

Capaian kinerja indikator pada LKj IP Pemerintah Kota Lhokseumawe terlihat lebih tinggi dari target capaian SPM. Namun demikian, capaian pada laporan SPM Kota Lhokseumawe tetap dalam kategori sangat baik dengan persentase 90% dan untuk LKj IP sebesar 99%.

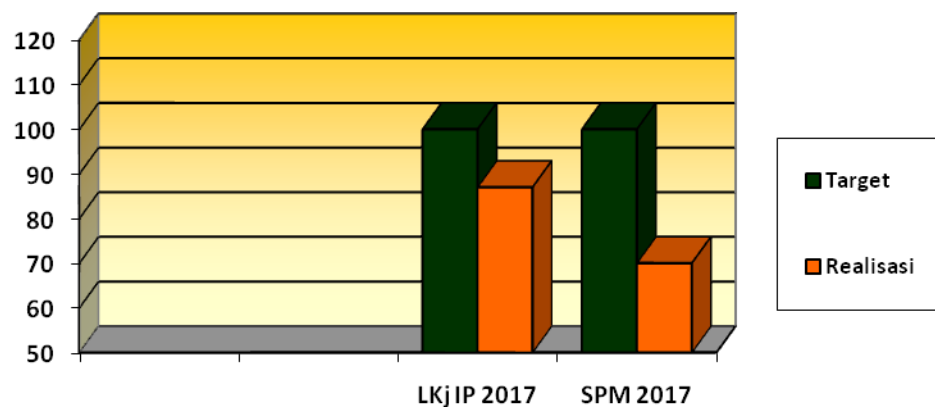
Dari 200 target yang ditetapkan, sebanyak 197 kasus yang ditangani. Berbeda dengan SPM, dari 100% target yang ditetapkan, teralisasi 90%.



Indikator ini diharapkan dapat meningkat pencapaiannya. Kendala yang ditemui adalah masih terbatasnya jumlah personil/petugas lapangan, masih lemahnya perlindungan hukum bagi aparatur dalam penegakkan Perwal/Qanun, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat cenderung mengabaikan Qanun/Perwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Untuk perbandingan capaian indikator di bidang pendidikan Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang sama dengan indikator pengukuran kinerja pada LKj IP 2017.

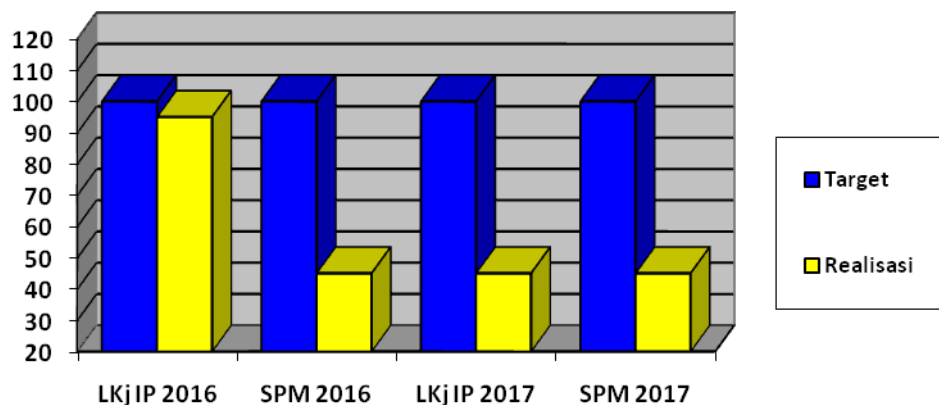


Berdasarkan laporan pencapaian target SPM Kota Lhokseumawe, pada setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4, pada tingkat SMP/MTS tersedia 70% guru yang berkualifikasi S1/D4. Berdasarkan data pada LKj IP 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dari 4.280 orang guru, sebanyak 3.761 orang yang telah berkualifikasi pendidikan S1/D4.

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang (Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik);

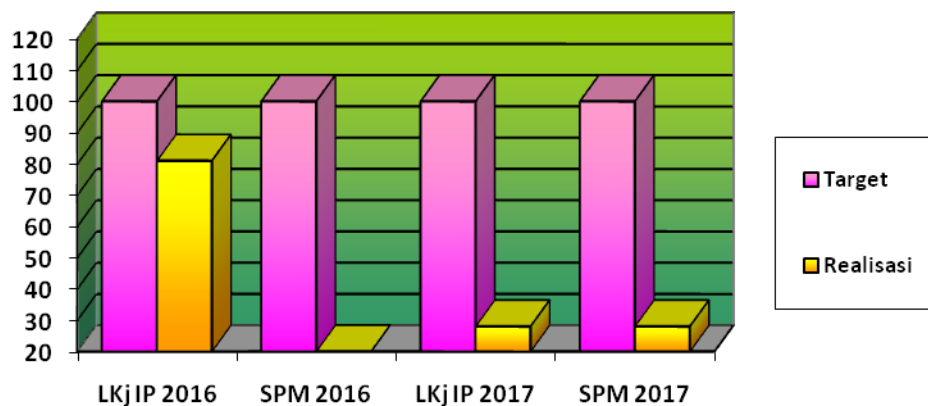
Pada capaian ini, perbedaan bunyi indikator tidak merubah maksud yang ingin dicapai oleh indikator masing-masing. Perbandingan capaian antara keduanya adalah sebagai berikut:



Perbandingan capaian kinerja pada LKj IP dengan SPM terlihat pada Tahun 2016 yang disebabkan capaian pada SPM berdasarkan laporan SPM semester I sehingga capaiannya sangat rendah.

Untuk Tahun 2017, realisasi atas target yang ditetapkan Pemerintah juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan baik pada laporan SPM maupun LKj IP. Tercatat bahwa dari 412.468 km total panjang jalan Kota Lhokseumawe, hanya sepanjang 147.668 km jalan dalam kondisi baik. Sehingga capaian kinerja indikator ini hanya mencapai angka 35,80% dan dibandingkan dengan target sebesar 78,8% persentase capaiannya adalah 45%..

b. Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan;



Dari grafik diatas, capaian indikator di Tahun 2017 berbeda jauh dengan capaian pada Tahun 2016. Sama seperti indikator sebelumnya dimana hal ini disebabkan belum sampainya laporan semester II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe sehingga data yang dipakai untuk capaian standar nasional adalah data yang sudah masuk yaitu laporan SPM Semester I.

Pada Tahun 2017, luas pemukiman kumuh yang berhasil dilakukan penataan dan pengurangan nilai kumuhnya adalah sebesar 28%. Dari 181,06 Hektar luas wilayah Kota Lhokseumawe, seluas 166,79 hektar yang termasuk dalam lingkungan kumuh dan Tahun 2017 hanya seluas 45,95 hektar yang berhasil ditangani.

3.1.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi (daya guna) merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau dalam hal ini adalah hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Efisiensi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 ini yaitu keberhasilan pencapaian hasil kerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan dengan input berupa Sumber Anggaran serta Sumber Daya Manusia.

Pencapaian target kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak hanya melalui pemanfaatan sumber keuangan semata namun juga didukung oleh pemanfaatan sumber daya aparatur yang dimilikinya.

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam instansi/organisasi. Penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi tidak bermakna tanpa Sumber Daya Manusia menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mengelola instansi dengan baik pula. Penegelolaan disini adalah pengelolaan disemua bidang pekerjaan termasuk pelayanan dan perencanaan.

Sumber daya manusia penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe per 31 Desember 2016 sebanyak 4.359 orang. Rincian pegawai menurut golongan digambarkan sebagai berikut :

Golongan	Jumlah Pegawai
- Golongan IV	1.269 Orang
- Golongan III	2.325 Orang
- Golongan II	716 Orang
- Golongan I	49 Orang
J u m l a h	4.359 Orang

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe 2016

Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada tanggal 31 Desember 2016, struktur organisasi perangkat daerah Kota Lhokseumawe kembali dibentuk melalui penetapan Qanun Nomor 9 Tahun 2016 sebagai implementasi dari PP No.18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun susunan organisasi perangkat daerah Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang Asisten dan 9 (tujuh) bagian sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian Pembangunan
 - Bagian Layanan Pengadaan
- c. Asisten Administrasi Umum
 - Bagian Umum
 - Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
 - Bagian Organisasi

Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu. Dinas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe berjumlah 10 (sepuluh) dinas yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe
2. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe

4. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak/Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe
6. Dinas Kelautan/Perikanan/Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe
7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe
10. Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
11. Dinas Perindustri/Perdagangan/Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe
12. Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe
13. Dinas Pemuda/Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe
14. Dinas Komunikasi/Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe
16. Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis yang terdapat dalam Pemerintah Kota selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK mencakup :

1. Sekretariat Dewan Kota Lhokseumawe
2. Inspektorat Kota Lhokseumawe
3. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah PK Kota Lhokseumawe
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

7. Badan Penanggulangan Bencana Kota Lhokseumawe
8. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Lhokseumawe
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

Lembaga Keistimewaan terdiri dari :

1. Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)
2. Sekretariat MPD (Majelis Pendidikan Aceh)
3. Sekretariat MAA (Majelis Adat Aceh)
4. Baitul Mal

Per Desember 2016 dibentuk dinas baru sebanyak 2 dinas dan lembaga teknis daerah sebanyak 2 lembaga teknis daerah.

Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Banda Sakti,
2. Kecamatan Blang Mangat,
3. Kecamatan Muara Dua dan
4. Kecamatan Muara Satu.

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, sekretariat kecamatan, dan lima seksi. Pemerintah Kota Lhokseumawe dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi.

Dengan jumlah Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat dan Kecamatan yang berjumlah sebanyak 33 SKPD, Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah dapat menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017.

Dukungan sumber daya aparatur yang berjumlah 4.359 orang juga menjadi kekuatan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2017.

Untuk mendukung program kegiatan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Lhokseumawe didukung dengan jumlah *APBK-P atas belanja langsung* sebesar **Rp. 492.283.190.315,-** dan *teralisasi* sebesar **Rp. 391.253.332.330,-** atau sebesar **79%**.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe, efisiensi atas penggunaan anggaran yang dilakukan pada Tahun 2017 adalah sebesar 21%, sedangkan untuk efektifitas pelaksanaan program adalah sebesar 23% dimana dari 175 program yang masuk dalam RKPD, sebanyak 135 program yang terlaksana dan dapat memberikan capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar **86%** dengan kategori capaian **sangat baik**.

3.2 ASPEK KEUANGAN

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendiikan dan Kebudayaan	63.297.750.581	40.482.111.614	89%
2	Dinas Kesehatan	55.079.598.881	42.143.669.480	89%
3	Dinas Pekerjaan Umum	192.127.678.700	186.978.834.337	88%
4	Dinas Perhubungan	5.073.813.950	4.719.127.711	94%
5	Dinas Kependudukan dan Capil	1.777.610.467	1.579.901.880	91%
6	Dinas PP, PA, PP dan KB	3.775.806.950	3.350.069.303	95%
7	Dinas Sosial	9.408.739.812	8.302.270.826	97%
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.395.907.403	14.535.135.314	83%
9	Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah	12.821.909.336	11.647.679.864	96%
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja	1.694.087.400	1.617.627.586	97%
11	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	2.268.430.780	2.208.798.784	97%
12	Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian dan Pangan	10.423.169.899	8.609.102.709	94%

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2017

13	Dinas Lingkungan Hidup	23.505.102.489	22.564.249.204	78%
14	Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata	1.819.900.800	1.761.643.515	87%
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	521.481.605	507.279.100	96%
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1.658.290.418	1.563.994.432	96%
17	Bappeda	5.378.560.239	4.194.268.646	47%
18	BKPSDM	1.046.551.968	910.961.648	900%
19	Inspektorat	1.907.696.412	1.824.781.714	93%
20	Badan Kesbangpol dan Linmas	1.036.154.485	989.928.815	93%
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.754.979.706	7.436.770.307	99%
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.831.274.866	8.843.241.2131	88%
23	DPRK	12.537.487.072	11.705.192.631	99%
24	Sekretariat Daerah	26.921.772.694	25.016.813.126	99%
25	Sekretariat MPU	1.548.718.800	1.533.247.481	95%
26	Sekretariat MAA	573.673.890	505.684.474	93%
27	Sekretariat MPD	532.542.945	528.825.950	97%
28	Sekretariat Baitul Mal	5.603.041.270	5.547.850.504	97%
29	Satuan Satpol PP & WH	6.176.497.482	5.892.258.313	94%
30	Kantor Camat Muara Satu	699.935.225	649.453.326	89%
31	Kantor Camat Muara Dua	696.731.835	676.369.319	89%
32	Kantor Camat Banda Sakti	711.080.928	688.461.665	88%
33	Kantor Camat Blang Mangat	677.211.027	639.937.273	94%
JUMLAH BELANJA		492.283.190.315	391.253.332.330	79%

Sumber Bid. Akuntansi - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 (**unaudited**)